



STUDI KARAKTERISTIK DAERAH  
MENGEMBANGKAN KURIKULUM  
**KEMARITIMAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018



**KARAKTERISTIK DAERAH  
DALAM MENGEMBANGKAN  
KURIKULUM KEMARITIMAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018**

# **Karakteristik Daerah dalam Mengembangkan Kurikulum Kemaritiman**

## **Tim Penyusun :**

Sapto Aji Wirantho, S.Sos., M.Pd.

Dr. Soraya Ramli, M.Hum

Farah Arriani, M.Pd.

Eka Setiawati, S.Kom., M.Ak

Dyah Suryawati, S.Si.

Unggul Sudrajat, SS

ISBN : 978-602-0792-04-0

## **Penyunting :**

Dra. Ida Kintamani D.H., M.Sc.

Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.

## **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

Email: [puslitjakkbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakkbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, November 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakkbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

## KATA PENGANTAR

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap dijaga kelestariannya. Wilayah Indonesia meliputi daratan dan lautan. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 3/4 dari seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, kemaritiman mulai bergaung pada masa pemerintahan sekarang. Di dalamnya terdapat program Nawacita yang menonjolkan kemaritiman. Tentu saja ini bukan disikapi sebagai eforia semata, namun harus didukung oleh semua elemen. Salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan ini tidak saja di lingkungan sekolah, namun juga harus didukung lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kurikulum yang dikembangkan tak hanya harus memiliki muatan pengetahuan melainkan juga memperhatikan potensi dan karakteristik daerah, tuntutan pembangunan dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan memahami kompleksitas dan variasi masing-masing daerah dan sekolah. Di sisi lain, daerah/sekolah harus memiliki kemampuan menjabarkan standar nasional ke dalam kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Hal ini yang disebut diversifikasi kurikulum.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan pemikiran dan sumbang saran sehingga buku ini dapat diterbitkan. Walaupun demikian, kami menerima masukan dan saran dari berbagai pihak.

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Ruang Lingkup.....	19
E. Kerangka Pikir .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Karakteristik Daerah .....	21
B. Kurikulum .....	22
C. Kemaritan .....	25
D. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).....	28
E. Hasil Penelitian yang Relevan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
B. Latar Penelitian .....	35
C. Metode dan Prosedur Penelitian .....	50
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	53
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. DKI Jakarta .....	56
B. Sulawesi Selatan .....	74
C. Jawa Timur.....	101
D. Sumatera Utara.....	123
<b>BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>141</b>
A. Simpulan .....	141
B. Rekomendasi.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sosialisasi dan pelatihan kurikulum yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau daerah kepada satuan pendidikan tidak langsung membawa dampak pada peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam memahami dan mengembangkan perangkatnya untuk mengimplementasikan kurikulum. Hal ini terlihat bahwa masih ada tenaga pendidik yang belum dapat membuat sendiri Dokumen 1 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Dokumen 2 (silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sehingga mereka masih menggunakan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari sekolah lain dan tenaga pendidik lain atau dari kelompoknya (Musyawarah Guru Mata Pelajaran – MGMP dan Kelompok Kerja Guru – KKG). Hal lain yang ditemukan adalah kapasitas Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang belum merata. Dalam hal ini, tenaga pendidik juga bisa berperan sebagai TPK di satuan pendidikan dan atau di daerah. Fakta-fakta tersebut ditemukan berdasarkan tinjauan di lapangan pada saat Pusat Kurikulum dan Perbukuan

(Puskurbuk) mengadakan kegiatan bantuan teknis profesional dalam mendampingi TPK provinsi/kabupaten/kota dan membina rintisan daerah piloting di provinsi. Puskurbuk membantu daerah/sekolah dalam memahami dan mengembangkan perangkat kurikulum.

Saat ini, perkembangan kurikulum yang dinamis dilakukan untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, pertumbuhan masyarakat,antisipasi perkembangan kehidupan, dan ilmu pengetahuan abad ke-21. Perkembangan ini juga mengubah layanan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik seperti amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Inspektorat Jenderal, 2003). Hal ini berimplikasi pada perubahan pola pengembangan kurikulum secara mendasar dari yang sifatnya terpusat menjadi kedaerahan, serta pentingnya layanan profesional pengembangan kurikulum dan sarana pendukung pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berkembang sesuai tuntutan zaman. Menurut Bobbit (1918) dalam Ahid (2006:1), inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan

manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan-kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungan.

Tjalla dalam Republika edisi 15 September 2016 menyatakan bahwa ada dua sumber kekuatan utama yang menghadirkan roh kurikulum, yaitu substansi dan cara pengelolaan kurikulum. Keduanya saling bersinergi. Tanpa pengelolaan yang benar, substansi yang hebat akan kehilangan daya. Demikian pula sebaliknya, agar substansi kurikulum dapat dikelola dengan baik, semua kebijakan tentang kurikulum harus mudah dipahami, dijabarkan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekitarnya (*fleksibel*), mudah dikelola oleh guru (*manageable*), terukur ketercapaiannya (*measurable*), terlihat (*observable*), dan dapat diprediksi hasilnya (*predictable*).

Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi daerah sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya, pada Ayat 3 juga dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 1) peningkatan iman dan takwa; 2) peningkatan ahlak mulia; 3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; 5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 6) tuntutan kerja. Dengan kata lain, kurikulum yang dikembangkan tak hanya harus memiliki muatan pengetahuan tetapi juga memperhatikan potensi dan karakteristik daerah, tuntutan pembangunan dan perkembangan peserta didik.

Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan memahami kompleksitas dan variasi masing-masing daerah dan sekolah. Di sisi lain, daerah/sekolah harus memiliki kemampuan menjabarkan standar nasional ke dalam kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Hal ini yang disebut *diversifikasi kurikulum*.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). SDA tersebut berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap dijaga kelestariannya. Wilayah Indonesia meliputi daratan dan lautan. Luas wilayah laut

Indonesia mencapai 3/4 dari seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Nilai ekonomi kelautan dari bidang-bidang utama maritim adalah (Marsetio, 2014:21).

1. Nilai ekonomi perikanan termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan sebesar USD 47 miliar per tahun.
2. Nilai ekonomi pariwisata bahari mencapai USD 29 miliar yang tersebar di 241 kabupaten/kota.
3. Nilai ekonomi dari energi terbarukan mencapai USD 80 miliar per tahun yang terdiri atas energi arus laut, pasang surut, gelombang biofuel alga, panas laut.
4. Nilai ekonomi biofarmasitika laut mencapai USD 330 miliar per tahun yang didukung oleh tingginya kelimpahan dan keanekaragaman hayati laut Indonesia untuk pengembangan industri bioteknologi bahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan bioremediasi.
5. Nilai ekonomi transportasi laut mencapai USD 90 miliar per tahun didukung oleh potensi jaringan transportasi laut nasional dan internasional, posisi strategis Indonesia, dan ALKI.
6. Nilai ekonomi minyak bumi dan gas *offshore* mencapai

USD 68 miliar per tahun. Sebanyak 70 persen dari produksi minyak dan gas bumi berasal dari pesisir. Selain itu, 40 dari 60 cekungan potensial mengandung migas terdapat di lepas pantai. Sebanyak 14 lainnya terletak di pesisir. Hanya 6 sumber yang terletak di daratan. Nilai ekonomi mineral *seabed* mencapai USD 256 miliar per tahun dan industri dan jasa maritim mencapai USD 72 miliar per tahun.

7. Nilai ekonomi garam industri mencapai USD 28 miliar per tahun.

Pujiastuti (2015) dalam majalah Majelis edisi 1 Januari 2015 menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi maritim luar biasa. Hal ini didasarkan fakta-fakta bahwa: 1) Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar; 2) Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia (sekitar 81.000 km) dan terletak di antara persilangan dua benua dua samudera serta memiliki wilayah laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia; 3) luas wilayah laut Indonesia mencapai 3/4 dari seluruh wilayah Indonesia; 4) potensi laut Indonesia memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran; dan 5) data *Food and Agriculture Organization* 2012 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam

produksi perikanan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak di perairan Indonesia. Walaupun demikian, baru 10% potensi maritim Indonesia yang telah dieksplorasi dan dimanfaatkan.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kemaritiman berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperempat dari seluruh total penduduk miskin adalah kelompok dan keluarga nelayan tradisional di pesisir, yaitu sebanyak 7,87 juta orang atau 25,14% dari jumlah penduduk miskin nasional yang berjumlah 31,02 juta orang (wartaekonomi.co.id edisi 29 September 2014).

Upaya pemanfaatan ekonomi kemaritiman dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat di daerah maritim. Kadir (2010) menyatakan bahwa untuk membentuk SDM pesisir yang berkualitas diperlukan pendidikan yang berbasis potensi masyarakat pesisir. Misalnya, dengan merancang bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, diperlukan pula muatan lokal untuk mengangkat kearifan lokal tiap daerah. Sayangnya, belum semua daerah memilikinya.

Pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak di daerah maritim

bukan hanya pada membaca dan menulis, tapi bagaimana konten tersebut bisa cocok dengan lingkungan mereka (Antoninis, news.okezone.com edisi 6 September 2016).

Kemaritiman sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki oleh daerah pesisir dapat dikembangkan sebagai konten dalam kurikulum sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan sendiri kurikulum yang disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan konsep diversifikasi tingkat daerah, satuan pendidikan, dan siswa. Kemaritiman dapat dijadikan sebagai muatan/konten/subtansi dalam pengembangan perangkat kurikulum di daerah maritim sebagai bentuk penjabaran Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun, tidak mudah menjabarkan hal tersebut ke dalam kurikulum dan perangkatnya karena dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan karakteristik dan potensi daerahnya sendiri yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional dan daerah yang mengacu pada SNP.

Karakteristik dan potensi daerah akan lebih mudah ditanamkan sejak dini karena anak usia dini lebih lekat dengan apa yang ada di daerah sekitarnya sehingga ketika mereka beranjak dewasa diharapkan mereka akan lebih memiliki kepedulian. Hal ini adalah pembelajaran bagi mereka dan membutuhkan proses yang cukup lama.

Proses ini membutuhkan figur pembimbing sekaligus pemberi penekanan dan teladan. Figur ini adalah orang dewasa, di antaranya orang tua dan guru. Guru merupakan figur yang selalu hadir di kegiatan formal di lingkungan sekolah. Bagi guru untuk anak usia dini, akan lebih mudah mengenalkan alam sekitar kepada siswa dengan kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam kurikulum. Namun, bagi guru SMA dan SMK, cara yang sama akan lebih sulit diterapkan karena siswa SMA dan SMK sudah dapat berpikir kritis. Mereka juga tidak hanya berorientasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga di antara mereka yang ingin langsung bekerja. Oleh karena itu, agar mereka siap bekerja, mereka perlu diberikan bekal kecakapan hidup (*life skill*) tentang kemandirian. SMA/SMK merupakan jenjang pendidikan awal sebelum siswa masuk ke dunia kerja. Melalui satuan pendidikan ini diharapkan siswa memperoleh keterampilan awal sebagai bekal kehidupan di masa depan sehingga mereka dapat mandiri dan mengangkat potensi daerahnya.

Perguruan Taman Madya (SMA) hendaknya ditujukan pada dua aliran, yaitu: 1) kemasyarakatan, untuk memberi bekal kepada siswa agar dapat tempat yang patut di dalam hidup bersama. Hal ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kebangsaan untuk mendapat didikan praktik; 2) untuk

meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi (*hooge scholen*) baik di luar maupun dalam negeri (Dewantara, 2004:130). Namun, Wiles (2007:256) menyatakan kurikulum sekolah menengah terkait dengan kebutuhan khusus remaja pra dan awal, definisi komprehensif pendidikan, dan promosi yang kontinuitas dalam belajar dan pengembangan, lebih dari serangkaian frase menangkap dan inovasi pendidikan. Kurikulum sekolah menengah memiliki kompleksitas dari desain pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan program ini terkait dengan perencanaan yang signifikan.

Kemaritiman sebagai salah satu potensi daerah dan kearifan lokal yang paling menonjol di Indonesia dapat diintegrasikan sebagai muatan kurikulum dalam pembelajaran yang dapat mengangkat potensi Indonesia. Terutama untuk mempersiapkan peserta didik SMA dan SMK menuju dunia kerja.

Penelitian studi karakteritik ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016, yaitu penelitian pembelajaran ekonomi kreatif di daerah maritim. Dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa SMA dan SMK di daerah maritim belum memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik dan satuan pendidikan di daerah maritim belum mengembangkan muatan lokal (mulok) yang

didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan daerah.

SMK merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk terjun di dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja yang produktif maupun wirausahawan yang dapat membuka usaha secara mandiri. Peserta didik di SMK disiapkan untuk mandiri dengan keterampilan dan ilmu yang digeluti pada bidang tertentu. Hal tersebut mengacu pada isi Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, mengenai tujuan pendidikan nasional, dan penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu (Jakarta: Inspektorat Jenderal, 2003).

Tantangan utama bagi bangsa Indonesia di masa mendatang adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan manajemen. Kompetisi diperlukan untuk membangun daya saing bangsa dan ketahanan ekonomi masyarakat. SMK merupakan salah satu alternatif pendidikan yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Kemandirian yang diharapkan dimiliki oleh lulusan SMK hingga saat ini belum terlihat seperti apa yang diharapkan. Terdapat sejumlah masalah yang dimiliki oleh

lulusan SMK. Seperti yang dikemukakan oleh Komariah (2010:128) meskipun SMK telah menunjukkan peran-peran yang positif, namun kenyataannya saat ini masih dijumpai sejumlah permasalahan yang berdampak pada lulusannya, yaitu belum semua lulusan SMK langsung mendapat pekerjaan, belum mampu bekerja mandiri, banyak guru-guru yang kurang profesional, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan SMK, kualitas pembelajaran yang masih membutuhkan peningkatan, tantangan perubahan yang begitu cepat, serta kurang kolaborasi antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2017 dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang yang bekerja, dan sisanya 7,01 juta orang dipastikan pengangguran. Dari jumlah tersebut, pengangguran yang berasal dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas sebesar 9,27% yang disusul oleh pengangguran lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%, sedangkan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas sebanyak 4,98%. Kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya disebabkan oleh

lebih rendahnya keahlian khusus atau *soft skill* lulusan SMK dibandingkan lulusan SMA. Hal ini berimbas pada rendahnya animo masyarakat untuk bersekolah di SMK dibandingkan SMA (finance.detik.com edisi 22 Mei 2017).

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dimuat dalam tirtoid menunjukkan jumlah siswa SMA lebih besar dibandingkan SMK. Untuk tahun ajaran 2015/2016, jumlah siswa SMA sebanyak 4.442.835 siswa, sementara SMK 4.419.423 siswa. Kurangnya minat siswa salah satunya karena ada anggapan bahwa lulusan SMK sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Level pekerjaannya dianggap kurang bergengsi untuk kaum muda. Data ILO menunjukkan, jumlah angkatan kerja dari SMA lebih banyak jika dibandingkan SMK. Pada tahun 2014, jumlah angkatan kerja lulusan SMA mencapai 20,5 juta, SMK hanya 11,8 juta orang.

Menurut Wardiman (2007) dalam Notonegoro (2010), terkait dengan fenomena tersebut dunia pendidikan perlu menggali kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini karena masih terjadi gap antara dunia pendidikan dan DUDI (*link and match*). Dunia pendidikan harus berusaha secara terus menerus mengejar dan menyesuaikan kompetensi yang diharapkan oleh

dunia kerja yang sarat akan perubahan dan ketidakpastian karena sulitnya memprediksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3, Tahun 2014 tentang Perindustrian (Republik Indonesia, 2014) telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Seperti diuraikan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035 bahwa ketersediaan tenaga kerja kompeten merupakan bagian dari dinamika terkait sektor industri dalam rencana tersebut, mengingat pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, 2015).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro

seperti dikutip dari Kontan News edisi 22 Mei 2017 yaitu pendidikan vokasi akan dijadikan sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2018. Pemerintah akan melakukan pendekatan melalui dua arah, baik dari infrastruktur seperti penambahan jumlah sekolah, ruang kelas, maupun peralatan penunjang, serta memperbaiki kurikulum dan kualitas guru.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 130/D/Kep/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan ditetapkan bahwa Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan memuat Muatan Umum yang terdiri dari Muatan Nasional dan Muatan Kewilayahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah dan Muatan Peminatan Kejuruan yang terdiri dari Dasar Bidang Keahlian, Dasar Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian. Struktur kurikulum SMK saat ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, perbedaan yang signifikan adalah adanya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.

Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk merevitalisasi SMK dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9, Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dengan menginstruksikan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan para gubernur untuk memperkuat sinergi dalam rangka merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia salah satunya adalah kementerian kelautan dan perikanan untuk: 1) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan; 2) meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan; 3) memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; 4) mempercepat penyelesaian standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Keberadaan SMK yang berciri khas kemaritiman adalah salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masa depan, lulusan tak hanya diharapkan memiliki pengetahuan melainkan juga *life skill* untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Secara garis besar, pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Masing-masing pertanyaan penelitian diperdalam dengan pernyataan khusus.

1. Bagaimana satuan pendidikan mempersiapkan kurikulum kemaritiman
  - a. Bagaimana satuan pendidikan menyiapkan kompetensi kemaritiman untuk peserta didik?
  - b. Bagaimana kompetensi lulusan SMK dan peluang kerjanya?
  - c. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum? (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan)
  - d. Aspek-aspek apa yang diperhatikan dalam pengembangannya?
2. Bagaimana dukungan yang ada bagi penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum kemaritiman?
  - a. Bagaimana permasalahan kebijakan (pusat/daerah/pihak lain) dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK kemaritiman?

- b. Sejauh mana dukungan pemerintah pusat/daerah, kementerian, DUDI, orang tua dan lainnya dalam penyelenggaraan SMK Kemaritiman?
- c. Bagaimana penyaluran dari sekolah dan penyerapan dari dunia kerja terhadap lulusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara satuan pendidikan mempersiapkan kurikulum kemaritiman dan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan kemaritiman. Untuk mendapatkan gambaran persiapan kurikulum, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat cara sakolah (satuan pendidikan) mempersiapkan kompetensi kemaritiman, cara mengembangkan kurikulum, dan aspek yang diperhatikan pengembangannya. Untuk menginvestigasi dukungan bagi penyelenggaraan, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki permasalahan kebijakan dalam pembelajaran maritim, dukungan bagi penyelenggaraan kemaritiman, kompetensi dan peluang kerja lulusan SMK. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan pada Kemendikbud, khususnya: 1) Balitbang agar dapat mengembangkan kajian yang berkaitan dengan kurikulum kemaritiman; 2) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

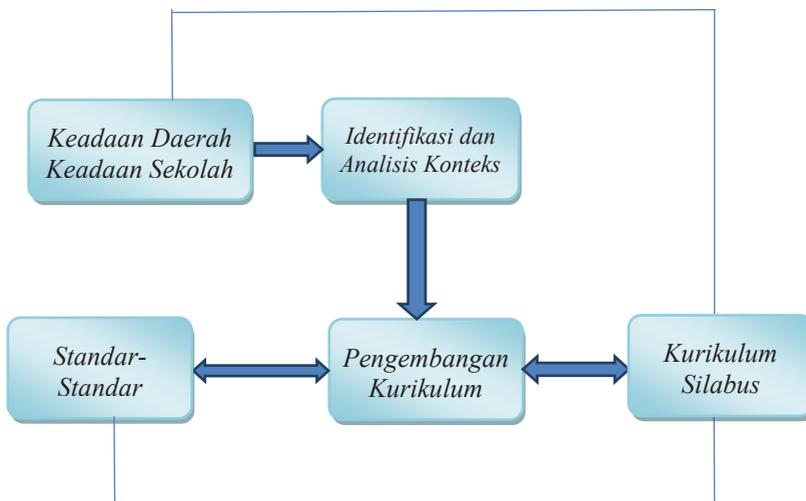
Kejuruan dapat menjembatani kompetensi lulusan peserta didik dengan dunia kerja yang dibutuhkan di dunia kemaritiman.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi pada kurikulum SMK dengan bidang keahlian Kemaritiman, penyelenggaraan pendidikan kemaritiman. Data dalam penelitian ini juga dibatasi hanya pada SMK yang berlokasi di daerah dengan budaya maritim. Penelaahan kurikulum dalam penelitian ini juga dibatasi pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan.

## E. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir dari penelitian ini.



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian**

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Karakteristik Daerah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik didefinisikan sebagai suatu kondisi mempunyai sifat khas. Daerah adalah tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota (wilayah dan sebagainya atau tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklimnya, hasilnya, dan sebagainya). Oleh karena penelitian ini terkait dengan kemaritiman, definisi operasional dari karakteristik daerah adalah tempat dalam sebuah wilayah tertentu yang memiliki kondisi kemaritiman yang khas. Biasanya ciri khas daerah ini juga dapat dijadikan sektor unggulan.

Berdasarkan ekosistemnya, Gertz dalam Suseno yang dimuat dalam *Visi Maritim Indonesia (2014:16)* membagi corak kebudayaan masyarakat di nusantara ke dalam tiga kategori yaitu: masyarakat petani, masyarakat pantai, dan masyarakat pemburu sebagai berikut.

1. Masyarakat petani, berkembang dengan melakukan irigasi di wilayah “Indonesia Dalam” yang berkonsentrasi di Jawa dan Bali.

2. Masyarakat pantai, ditandai dengan perdagangan yang secara kuat dipengaruhi oleh Islam, tersebar di sepanjang pantai, terutama di wilayah “Indonesia Luar” seperti pantai Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Selatan yang didukung oleh orang Melayu, Bugis dan Makassar.
3. Masyarakat peladang dan pemburu, hidup di wilayah yang jarang penduduknya seperti masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan, Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain.

## **B. Kurikulum**

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* dan *curere* yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari dalam sebuah perlombaan yang telah dibentuk seperti rute yang harus dilalui oleh kompetitor perlombaan. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish* (Mudhofir, 2011:1). Menurut Arifin (2013:2) kurikulum dalam bahasa Perancis berasal dari kata *courier* yang berarti berlari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 2013) menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Menurut Sukmadinata (2000) yang dikutip oleh Ahid (2006:27) ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan

dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten/kota, provinsi ataupun seluruh negara.

Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum.

Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga dengan

adanya kurikulum pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi terarah.

Kurikulum dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi daerah sekitar. Kurikulum untuk anak usia dini tentunya berbeda dengan kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah. Wiles (2007:256) menyatakan kurikulum sekolah menengah terkait dengan kebutuhan khusus remaja pra dan awal, definisi komprehensif pendidikan, dan promosi yang kontinuitas dalam belajar dan pengembangan, lebih dari serangkaian frase menangkap dan inovasi pendidikan.

### **C. Kemaritiman**

Dalam KBBI, maritim didefinisikan sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, sedangkan kemaritiman didefinisikan sebagai hal-hal yang menyangkut masalah maritim. Terdapat perbedaan definisi antara kemaritiman, kelautan, dan bahari. Kemaritiman merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Kelautan adalah hal-hal

yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolam air, dasar laut, dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil serta ruang udara di atasnya. Bahari adalah kebudayaan bahari/sumber daya manusia/kebudayaannya/orang-orang yang bergerak di kelautan/kemaritiman (Al Hanif, 2017).

Djalal dalam Visi Maritim Indonesia menyatakan bahwa “kelautan” tidak sama dengan “maritim”. Kelautan (*oceanic*) didefinisikan sebagai potensi laut baik secara geografis dan demografis, paralel dengan kehidupan nelayan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan “maritim” (*maritime*) diartikan sebagai kondisi di mana manusia telah mampu mengelola geografi dan sumber daya laut di dalamnya untuk kepentingan hidupnya (2014:4).

Potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia diangkat kembali pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dimuat dalam Metro News edisi 13 November 2014, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

#### **D. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 Ayat 15 yaitu Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Dalam Undang-Undang Sisdiknas (Republik Indonesia, 2003), penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Mengacu pada UU tersebut disimpulkan bahwa peserta didik di SMK disiapkan untuk mandiri dengan keterampilan dan ilmu yang digeluti pada bidang tertentu.

Pendidikan kejuruan menurut Sudira dalam Rasto (2012:3) memiliki tiga manfaat utama yaitu:

1. Bagi peserta didik: untuk peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan, peningkatan peluang berwirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut,

- penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan;
2. Bagi dunia kerja: agar dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha;
  3. Bagi masyarakat: untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara, dan mengurangi pengangguran.

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan tak hanya dapat meningkatkan kualitas peserta didik namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang diuraikan oleh Djohar (2007:1295–1297) dalam Rasto (2012:11) sebagai berikut:

1. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, orientasi pendidikannya tertuju pada lulusan yang dapat dipasarkan di pasar kerja.
2. Justifikasi pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri.

3. Pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan mencakup domain afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar, maupun situasi kerja yang sebenarnya.
4. Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa di sekolah (*in-school success*), dan keberhasilan siswa di luar sekolah (*out-of school success*). Kriteria pertama meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria kedua diindikasikan oleh keberhasilan atau penampilan lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya.
5. Pendidikan kejuruan memiliki kepekaan/daya suai (*responsiveness*) terhadap perkembangan dunia kerja. Oleh karena itu pendidikan kejuruan harus bersifat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan menekankan pada upaya adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir anak didik dalam jangka panjang.
6. Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan, untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat

mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif.

7. Hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan DUDI merupakan suatu keharusan, seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan DUDI.

Kurikulum untuk SMA berbeda dengan kurikulum SMK. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, dinyatakan bahwa struktur kurikulum SMA/MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan mata pelajaran peminatan Bahasa dan Budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan

Menengah Kejuruan, terdapat spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, yaitu ada 9 keahlian yang meliputi:

- 1) bidang teknologi dan rekayasa;
- 2) bidang energi dan pertambangan;
- 3) bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
- 4) bidang kesehatan dan pekerjaan sosial;
- 5) bidang agribisnis dan agroteknologi;
- 6) bidang kemaritiman;
- 7) bidang bisnis dan manajemen;
- 8) bidang pariwisata;
- 9) bidang seni dan industri kreatif.

Untuk program keahlian dan kompetensi keahlian SMK Kemaritiman disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian Kemaritiman**

<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Program Keahlian</b>	<b>Kompetensi Keahlian</b>
Kemaritiman	1. Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan 1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan
	2. Pelayaran Kapal Niaga	2.1 Nautika Kapal Niaga 2.2 Teknik Kapal Niaga
	3. Perikanan	3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar 3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 3.3 Agribisnis Ikan Hias 3.4 Agribisnis Rumput Laut

<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Program Keahlian</b>	<b>Kompetensi Keahlian</b>
		3.5 Industri Perikanan Laut
	4. Pengolahan Hasil Perikanan	4.1 Agribisnis Pengolahan

## **E. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dimaksudkan agar peneliti tidak hanya meniru, tetapi juga dapat mengambil masukan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti dapat menentukan langkah yang harus diambil dalam penelitian yang mereka lakukan baik untuk perbaikan penelitian atau hal-hal yang tidak perlu dilakukan selama penelitian sehingga penelitian yang dilakukan lebih optimal.

Penelitian yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam studi ini adalah:

Sapto Aji, Farah Arriani, Euis Yumirawati. *Penelitian Pembelajaran Ekonomi Kreatif di Daerah Maritim*, Tahun 2016.

Salah satu hasil dari penelitian tersebut yaitu SMA dan SMK di daerah maritim belum memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik dan satuan pendidikan di daerah maritim belum mengembangkan muatan lokal (mulok) yang didasarkan pada

karakteristik dan kebutuhan daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November–Desember 2017, sedangkan untuk pengambilan data dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat di bulan November 2017 di empat provinsi yaitu: DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

### **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di empat daerah, yaitu DKI Jakarta (Pulau Tidung), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pemilihan daerah didasarkan kriteria tertentu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. DKI Jakarta (Pulau Tidung)**

Pulau Tidung merupakan salah satu destinasi favorit di Jakarta. Pulau ini merupakan pulau terbesar di Kepulauan Seribu Selatan dengan luas lebih dari 50 hektar, panjang sekitar 4 km. Pulau ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Pulau Tidung memiliki potensi wisata maritim dengan kondisi alam yang mendukung. Pulau ini terdiri dari Tidung Besar dan Tidung Kecil. Pulau ini dikelilingi oleh laut. Tidung Besar dan Tidung Kecil dihubungkan oleh jembatan yang juga menjadi salah satu objek wisata di Pulau Tidung. Di Tidung Kecil juga terdapat kawasan perkembangbiakan mangrove, pulau ini tidak berpenghuni. Kegiatan wisata di Pulau Tidung sangat beragam, dari wisata air (menyelam, *snorkeling*, olah raga air, jet ski, *banana boat* dan lainnya), menanam bakau, transplantasi terumbu karang, ziarah makam Raja Pandita dan Panglima Hitam. Meski demikian, SMKN 61 sebagai satu-satunya SMK di Pulau Tidung tidak membuka program keahlian pariwisata.

Penduduk Pulau Tidung umumnya berprofesi sebagai nelayan meski banyak pula yang mengembangkan usaha menyewakan rumah sebagai *home stay* atau berjualan makanan. Secara geografi, SMKN 61 sangat ideal sebagai SMK kemaritiman. Karena lokasi yang dekat dengan laut sehingga dapat memanfaatkan laut sebagai lab pembelajaran. SMKN 61 merupakan salah satu dari 16 SMK kemaritiman yang ada di Jakarta

dan salah satu dari 2 SMK Kemaritiman negeri di Jakarta (Data Dapodik 2017). SMK ini membuka 2 program keahlian yang terkait dengan kemaritiman yaitu nautika kapal penangkap ikan dan budidaya perikanan, selain membuka pula untuk bisnis manajemen. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas SMK Negeri 61, yaitu berbasis perikanan dan kelautan serta bisnis dan manajemen.

SMKN 61 secara wilayah masih masuk bagian Jakarta namun posisi jauh dari Jakarta. Bahkan, jauh dari pusat administrasi Kepulauan Seribu, hal ini menyebabkan pengawasan dari pusat terkesan kurang termasuk dalam pemberian layanan informasi. Tak hanya itu, SMKN 16 ini pun terkesan minim sarana prasarana, meski pernah mendapatkan bantuan kapal, namun kapal sudah karam dan sudah tak dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Demikian juga untuk tenaga pengajar, umumnya hanya ada untuk pengajar normatif. Meski saat ini sekolah telah memberdayakan lulusan yang tamatan di STP (Sekolah Tinggi Perikanan) untuk membantu.

## **2. Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Maros)**

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perairan, hal ini tentu letak garis lintang mengakibatkan perbedaan zona iklim matahari, yang selanjutnya berpengaruh terhadap bentuk penyesuaian hidup, hal ini akan mempengaruhi sistem sosial budaya masyarakat.

Makassar dari segi geografis yang merupakan wilayah pesisir yang sejak dahulu sangat terkenal dengan pelaut yang handal dan mempunyai semangat bertahan hidup yang sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan "*The survival of the fittes*" dalam referensi teori evolusi dapat dikaitkan dengan spirit para petarung, bagaimana semangat para pelaut Bugis–Makassar menjelajahi samudera sebagaimana yang terekam dalam sejarah.

Wilayah pesisir dan laut merupakan bagian wilayah daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan prospektif untuk menjadi akselerator pembangunan perekonomian daerah jika dikelola

dengan baik dan optimum. Sebagai wilayah yang strategis, wilayah pesisir merupakan suatu zona yang diperuntukkan untuk berbagai aktivitas manusia baik secara sosial, kultural, ekonomi, industri maupun pemanfaatan secara langsung. Luas wilayah Sulawesi Selatan 46.717.48 km<sup>2</sup>. Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan yang memiliki 4 empat suku daerah, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja (<http://Sulselprov.go.id>). Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, berdasarkan data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) jumlah rumput laut yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 11.269.342.000 ton, 30% di antaranya berasal dari Sulawesi Selatan dengan 3.409.048, 20 ton ([bsn.go.id](http://bsn.go.id)).

Sulawesi Selatan khususnya Makassar sebagai penghubung yang menautkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur yang menyebabkan fungsi logistik, fungsi transportasi, dan fungsi perdagangan saling berpengaruh. Pelabuhan dan bandara yang memadai menjadikan potensi kota ini

makin terasa secara optimal. Selain itu, sistem yang terjalin dari turun-temurun penting diperhatikan untuk memahami lebih dalam tentang masyarakat pesisir.

Jumlah SMK Kemaritiman di Sulawesi Selatan sebanyak 54 SMK Kemaritiman dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Jumlah SMK Kemaritiman di 21 Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>No.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah SMK Kemaritiman</b>
1.	Kota Makassar	3
2.	Kab. Maros	2
3.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3
4.	Kab. Takalar	3
5.	Kab. Jeneponto	4
6.	Kab. Barru	3
7.	Kab. Bone	2
8.	Kab. Wajo	5
9.	Kab. Bantaeng	1
10.	Kab. Bulukumba	6
11.	Kab. Sinjai	3
12.	Kab. Kepulauan Selayar	2
13.	Kab. Pinrang	3
14.	Kab. Sidenreng Rappang	2
15.	Kab. Enrekang	2
16.	Kab. Luwu	1
17.	Kab. Luwu Utara	2
18.	Kab. Luwu Timur	2
19.	Kab. Toraja Utara	1

No.	Wilayah	Jumlah SMK Kemaritiman
20.	Kota Pare-Pare	2
21.	Kota Palopo	2
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>

Sumber: Dapodik (2017).

Semua kompetensi keahlian pada bidang keahlian kemaritiman ada di SMK Kemaritiman di wilayah Sulawesi Selatan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Jumlah Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian SMK Sulawesi Selatan**

No.	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Jumlah
1.	Perikanan	Agribisnis Perikanan	17
2.		Agribisnis Rumput Laut	2
3.		Budidaya Perikanan	13
4.		Budidaya Rumput Laut	1
5.	Pelayaran Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	20
6.		Teknika Kapal Niaga	14
7.	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	12
8.	Penangkap Ikan	Teknika Kapal Penangkap Ikan	5
9.	Agribisnis Pengolahan Ikan	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	5
10.			
<b>Jumlah</b>			<b>89</b>

Sumber: Dapodik (2017).

Dari data pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa program studi keahlian yang paling banyak adalah Pelayaran/Pelayaran Kapal Niaga yang terdiri dari dua kompetensi keahlian, yaitu Nautika Kapal Niaga dan Teknik Kapal Niaga dengan jumlah 34 Kompetensi Keahlian.

Penelitian ini melibatkan 2 SMK yang berada di Kota Makassar, yaitu SMKN 9 Makassar (Pelayaran Kapal Penangkap Ikan dan Perikanan) dan SMKS Pelayaran Katangka serta 1 SMK yang berada di Kota Maros, yaitu SMKN 1 Maros (Perikanan/Agribisnis Perikanan Air Tawar). Ketiga sekolah ini memiliki bidang keahlian kemaritiman meski dengan program keahlian dan kompetensi keahlian yang berbeda).

### **3. Jawa Timur (Kota Surabaya)**

Provinsi Jawa Timur memegang peran strategis dalam kebijakan poros maritim, yaitu sebagai rantai konektivitas serta jalur distribusi logistik di kepulauan nusantara. Jawa Timur juga memiliki potensi perikanan yang besar perlu dikembangkan. Pada umumnya arus kunjungan kapal pelayaran luar negeri dan dalam negeri dilakukan di empat pelabuhan utama yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pelabuhan

Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Wangi, dan Pelabuhan Probolinggo. Pelabuhan Gresik secara administratif termasuk di dalamnya Pelabuhan Sumenep, sedangkan Pelabuhan Probolinggo secara administratif termasuk di dalamnya Pelabuhan Pasuruan dan Situbondo. Empat pelabuhan utama ini yang merupakan pusat keluar masuknya barang dan penumpang di Jawa Timur.

Jawa Timur memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Sebagian besar produksi ikan terbanyak berasal dari budidaya laut serta perikanan tangkap laut, meliputi ikan cakalang, tongkol tuna dan lainnya. Sumber daya ini seharusnya dapat menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Timur. Wilayah pesisir dan lautan di Provinsi Jawa Timur juga berpotensi pada sektor wisata bahari (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2015).

Pengembangan kemaritiman di Provinsi Jawa Timur ini juga didukung dengan adanya Pangkalan Utama Angkatan Laut V sebagai Lamtamal terbesar di Indonesia dan mempunyai fasilitas pangkalan yang terlengkap di Indonesia yang mendukung keberadaan SMK pelayaran dan perikanan yang ada di Surabaya.

Sementara itu, dalam aspek yang lain, komitmen untuk mengembangkan kemaritiman di Provinsi Jawa Timur diwujudkan dengan 84 SMK kemaritiman yang memiliki 4 bidang yang terkait seperti pelayaran, perikanan, perkapalan, dan agribisnis (Data Dapodik 2017). Namun sayangnya, jumlah ini belum sebanding dengan luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang ada, sehingga kebutuhan dan keberadaan SMK Pelayaran dan Perikanan mutlak diperlukan dan terus ditambah. Aspek lain yang mendasari penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Dalam bidang kelengkapan jurusan yang berkaitan dengan maritim, Provinsi Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya dan sekitarnya memiliki SMK yang mempunyai banyak pilihan bidang keahlian. Di Kota Surabaya sendiri, terdapat beberapa SMK Pelayaran dan Perikanan seperti: SMKS Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya, SMKS Indo Baruna Surabaya, SMKS Wira Maritim Surabaya, SMKS KAL 2 Surabaya, dan SMK Pelayaran Yos Sudarso. Namun, demi memperoleh data yang komprehensif, serta merepresentasikan berbagai jurusan yang terkait

dengan kemaritiman seperti pelayaran, perikanan, perkapalan dan agribisnis, maka peneliti hanya mengundang 5 sekolah yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur seperti disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Nama Sekolah dan Kompetensi Keahlian**

No.	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian					
		Nautika Kapal Niaga	Teknik Mesin Kapal Perikanan	Agribisnis Perikanan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Budidaya Air Tawar	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
1.	SMKN 2 Turen Malang		√		√	√	√
2.	SMK Pelayaran Kristen Tuban	√	√		√		
3.	SMKN 1 Grati Pasuruan			√			
4.	SMK KAL 2 Surabaya	√	√		√		
5.	SMK Bhakti Samudra Surabaya	√	√				

#### **4. Sumatera Utara (Kota Medan)**

Sumatera Utara (Sumut) merupakan provinsi yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Provinsi ini memiliki garis pantai 1.300 km. Luas laut tersebut mencakup 60% wilayah. Sumut memiliki luas wilayah 181.680 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 71.680 km<sup>2</sup> wilayah darat dan luas laut 110.000 km<sup>2</sup>. Potensi perikanan wilayah laut Sumut baik di pantai barat dan timur cukup besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi perikanan Selat Malaka mencapai 276.000 ton/tahun sementara di Samudera Hindia 565.200 ton/tahun. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3, Tahun 2015 untuk meningkatkan harga jual hasil laut nelayan ([www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)).

Sumut memiliki pelabuhan terpenting pada masanya di pantai barat, seperti Barus, Sibolga dan di pantai timur seperti Belawan dan Tanjung Balai sehingga dapat dikatakan peran maritim Sumut sangat penting untuk sejarah Indonesia. Selain sebagai jalur perdagangan strategis di masa lalu, bangsa Arab juga menggunakannya untuk penyebaran agama Islam

Realisasi tangkapan perikanan laut masih belum maksimal karena: a) penangkapan masih menggunakan metode tradisional, seperti *one day fishing*; b) alat juga masih terbatas dan masih sering menggunakan alat yang dilarang seperti pukot hela dan pukot tarik; c) kapal modern yang ada di Sumut hanya 45%; d) masih banyak nelayan Sumut yang berpendidikan rendah; e) Sumut juga dinilai belum memaksimalkan potensi transportasi laut. Lokasi Sumut dari sisi industri logistik dinilai strategis. Bila dirinci, jumlah potensi lalu lintas peti kemas di Selat Malaka mencapai 51,5 juta TEUs per tahun. Namun, saat ini Singapura masih menjadi penguasa pangsa dengan 31,3 juta TEUs per tahun disusul Port Klang 10 juta TEUs per tahun.

Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Secara geografis, Sumatera

Utara relatif dekat dengan pusat-pusat bisnis berbasis maritim di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pembangunan-pembangunan pelabuhan merupakan jantung kegiatan ekonomi maritim. Kemudian Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dilaporkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan dan fasilitas pendukungnya telah selesai dibangun. Namun, lanjutnya pasokan listrik masih dibutuhkan ke depannya 450 MW yang saat ini masih tersedia sekitar 50 MW.

**Tabel 3.4 Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan di Sumatera Utara**

<b>Kawasan Andalan</b>	<b>Sektor Unggulan</b>
Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
Pematang Siantar dan sekitarnya	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
Rantau Prapat-Kisaran	Perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri
Tapanuli dan sekitarnya	Perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri, pariwisata
Nias dan sekitarnya	Pariwisata, perkebunan, perikanan
Laut Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya	Perikanan, pertambangan
Laut Selat Malaka dan sekitarnya	Perikanan, pertambangan

Sumber: <http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/potensi-pengembangan-wilayah>

Provinsi Sumatera Utara memiliki 46 SMK Kemaritiman yang tersebar dalam 10 kabupaten/kota terdapat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Jumlah SMK di 10 Kabupaten/Kota Sumatera Utara**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1.	Kab. Batu Bara	1
2.	Kab. Padang Lawas	1
3.	Kab. Labuhan Batu Utara	1
4.	Kab. Nias Barat	1
5.	Kab. Nias Utara	5
6.	Kota Medan	11
7.	Kota Tebing Tinggi	2
8.	Kota Tanjung Balai	1
9.	Kota Sibolga	1
10.	Kota Gunung Sitoli	1

Sumber: Data Dapodik (2017).

Kegiatan FGD melibatkan 2 SMK di Kota Medan, yaitu SMKN 12 Medan (Program Keahlian Pelayaran Kapal Niaga dan Pelayaran Kapal Penangkap Ikan) dan SMK Pelayaran Hang Tuah Belawan (Program Keahlian Kapal Niaga).

### **C. Metode dan Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang secara konseptual memiliki beberapa kesamaan dengan eksperimen. Menurut Robert K.

Yin (2002:15) sebuah studi kasus pada dasarnya seperti eksperimen dapat digeneralisasi ke proposisi teoritis dan bukan terhadap penduduk atau alam. Kesamaan antara studi kasus dengan eksperimen, dilihat dari tujuannya, yaitu mengembangkan dan menggeneralisasi teori (generalisasi analitis) dan bukan menghitung frekuensi (generalisasi statistik).

Menurut Emzir (2014:20), penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

Hal serupa ditegaskan oleh Duff (2008:22) dengan pernyataannya yang mendalam tentang definisi studi kasus, yaitu *“most definitions of case study highlight the “bounded”, singular nature of the case, the important of context, the availability of multiple sources of information or perspectives on observation, and the in-depth nature of analysis”*.

Dari definisi di atas maka dapat dilihat bahwa penelitian dengan menggunakan metode studi kasus lebih bertujuan untuk melihat dan menggali kejadian secara alami dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang memungkinkan

sehingga mencapai pada satu analisis yang mendalam tentang kejadian tersebut.

Menurut Merriam (2009:28), metode studi kasus juga memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakannya dengan metode penelitian kualitatif yang lain, yaitu *“qualitative case studies can be characterized as being particularistic, descriptive and heuristic”*. Hal yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah studi kasus memiliki karakteristik deskriptif.

Disimpulkan bahwa metode studi kasus digunakan dalam sebuah penelitian untuk melihat suatu objek atau peristiwa secara mendalam dengan latar yang alami. Studi kasus akan berhasil ketika peneliti menetapkan batasan yang jelas dan menggunakan berbagai informasi sebagai sumber data. Hasil dari berbagai informasi yang berhasil didapat akan dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang bermakna.

Setiap penelitian memiliki prosedur dan struktur yang jelas untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Desain studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk membandingkan beberapa unit kasus untuk dianalisis.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa penelitian ini mengkaji bagaimana kesiapan sekolah dalam mengetahui kesiapan daerah dalam mengembangkan kurikulum kemaritiman sesuai dengan karakteristik daerah.

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tim peneliti akan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai strategi pengumpulan data. FGD memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya merupakan metode pengumpul data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).

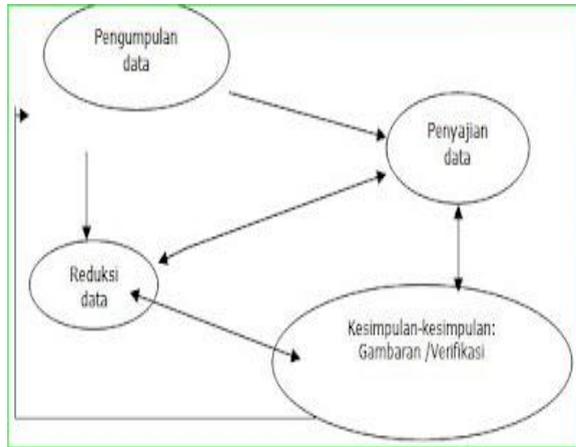
Krueger (1988) menyatakan FGD bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan pandangan peserta terhadap sesuatu, tidak berusaha mencari konsensus atau mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Oleh karena itu dalam FGD digunakan pertanyaan terbuka (*open ended*), yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan

## **E. Prosedur Analisis Data**

Sugiyono (2005:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari *data-reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

Selengkapnya, prosedur analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1 Tabel Analisis Data Miles-Huberman**

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DKI Jakarta**

##### **a. Temuan**

SMKN 61 Pulau Tidung sebagai satu-satunya SMK yang ada di Kepulauan Seribu.

##### **a. Cara Mengembangkan Kurikulum**

- 1) Sekolah tidak membuat kurikulum sinkronisasi dan hanya menetapkan standar kompetensi bagi seluruh siswa tanpa memandang jurusan. Semua siswa harus bisa berenang dan dapat membaca peta.
- 2) Kelas X telah menggunakan KI-KD di struktur kurikulum yang baru yang mengacu pada SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3305/D.D/KEP/KR/2017 tentang KI dan KD SMK/MAK (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017b).
- 3) Target kurikulum, muatan kewilayahan jadi urusan bersama.

##### **b. Aspek-aspek yang Diperhatikan Dalam**

## Pengembangan Dokumen Kurikulum dan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kurikulum

- 1) Dalam mengembangkan kurikulum sekolah tidak melibatkan instansi terkait lain di luar sekolah karena kerja sama antara instansi terkait dengan sekolah belum maksimal.
  - 2) Dalam membuat kurikulum, sekolah memiliki muatan kewilayahan.
- c. Masalah Kebijakan (Pusat/Daerah/Pihak Lain) dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di SMK Kemaritiman
- 1) Umumnya lulusan SMK Jurusan Pelayaran tidak melanjutkan menjadi pelaut karena diperlukan berbagai sertifikasi untuk dapat menjadi pelaut dan untuk memperolehnya diperlukan banyak biaya sehingga sebagian besar lulusan lebih memilih berwirausaha dan sebagian kecil lagi melanjutkan kuliah.
  - 2) Sekolah membutuhkan bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar. Lulusan Jurusan Teknik Pengolahan Hasil masih terkendala sarana karena kapal yang dimiliki sekolah telah lama rusak dan masih

dalam proses perbaikan. Perbaikan kapal dilakukan secara swadana sehingga untuk kegiatan praktik menggunakan mesin yang disewa dari warga.

- 3) Bantuan kementerian untuk sarana dan prasarana tidak ada. Misalnya: hasil olahan sekolah masih terkendala sarana prasarana, sekolah tidak memiliki ruang olahan khusus.
- 4) Sekolah sudah 2 tahun tak melakukan sertifikasi dikarenakan biaya yang besar.
- 5) Guru SMK umumnya belum memenuhi kualifikasi untuk menjadi asesor (instruktur). Padahal, materi yang didapat dalam pelatihan kurang lebih sama dengan materi yang diajarkan di sekolah hanya saja kualifikasi guru yang mengajar sudah terakreditasi dan instansi yang menyelenggarakan juga terakreditasi. Hal ini yang belum bisa dipenuhi oleh SMK kelautan secara global.
- 6) Biaya yang diperlukan untuk guru menjadi asesor sangat besar dan perlu bermacam-macam sehingga guru umumnya mengharapkan adanya undangan dari luar.

- d. Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian, DUDI, Orang Tua dan Lainnya dalam Penyelenggaraan SMK Kemaritiman
  - 1) DUDI melibatkan siswa untuk praktik informal memperbaiki kapal.
  - 2) Dukungan dari Industri Jasa Maritim TNI dalam bentuk pelatihan untuk kedisiplinan siswa.
  - 3) KKP melalui SPI.
  - 4) Dinas pendidikan pernah memberikan 2 kapal latih namun sudah lama rusak dan sudah mengajukan ke dinas untuk bantuan kapal.
- e. Satuan Pendidikan Menyiapkan Kompetensi Kemaritiman untuk Peserta Didik
  - 1) Sekolah minim SDM untuk tenaga keahlian sehingga sekolah merekrut guru non-PNS.
  - 2) Memberdayakan alumnus STP yang juga lulusan SMKN 61 untuk mengajar.
- f. Kesesuaian Peluang Kerja Kompetensi Lulusan SMK dengan Kompetensi yang Dimiliki oleh Lulusan SMK

- 1) Menurut pemerintah sekitar (kecamatan) kurikulum yang ada belum dapat menjawab tantangan lingkungan sekitar sehingga lulusan belum mampu berkarya untuk lingkungan.
- g. Penyaluran Lulusan dari Sekolah ke Dunia Kerja dan Penyerapan Dunia Kerja terhadap Lulusan dari Sekolah
- 1) Hanya sedikit siswa lulus yang melanjutkan untuk sertifikasi sehingga lulusan tidak bisa langsung bekerja dan memerlukan biaya yang besar untuk jadi pelaut. Keadaan ini mengurangi motivasi siswa di lingkungan sekitar untuk sekolah SMK dan mengambil jurusan NKPI.
  - 2) Setelah lulus, para lulusan tak dapat langsung bekerja. Kualitas lulusan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ikut kursus. Sekolah 3 tahun tetapi dikalahkan oleh yang beberapa bulan ikut kursus sehingga ada ketimpangan. Banyak yang memilih SMA kemudian ambil kursus daripada sekolah pelayaran tetapi tidak bisa langsung berlayar, tetap harus ikut kursus baru bisa ikut berlayar.

- 3) Lulusan SMK umumnya berwirausaha, hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjadi pelaut karena untuk menjadi pelaut dibutuhkan banyak biaya untuk sertifikasi.
- 4) Sekolah melibatkan alumni untuk membina adik-adik kelas.
- 5) Sekolah belum ada penyaluran khusus untuk lulusan.

## **b. Pembahasan**

### **a. Kurikulum**

Sekolah dalam mengembangkan kurikulum tidak melibatkan *stakeholder* terkait dan DUDI. Kondisi daerah yang dikelilingi oleh laut belum dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa dalam mengembangkan kurikulum, sekolah tidak melibatkan instansi terkait lain di luar sekolah. Hal ini seperti dinyatakan oleh Saleh, “*Dalam mengembangkan kurikulum sekolah memiliki tim pengembang kurikulum, yaitu kepsek, wakasek kurikulum dan kaprog, belum ada kesempatan memanggil DUDI. Mungkin ini yang terkait dengan sinkronisasi.*”

*Harusnya dilibatkan. dari administrasi pemerintah mungkin bisa diajak”.*

Pengembangan kurikulum memang sejatinya memperhatikan karakteristik dan potensi daerah seperti yang ada dalam Sisdiknas Pasal 36 Ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap daerah dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan potensi atau keunggulan yang dimiliki serta karakteristik peserta didiknya.

Pihak kelurahan yang menginginkan adanya penambahan kompetensi keahlian untuk sekolah, seperti diungkapkan oleh lurah di Kepulauan Tidung sebagai berikut: *“Kepulauan kaya akan ikan jadi kita sebatas bisa pengelolaan ikan bagaimana, diolah jadi apa memberdayakan ibu-ibu PKK diharapkan setelah tamat SMK, mereka juga harus bisa dengan hasil sekolahnya bisa memasarkan hasil untuk menambah ekonomi keluarga, ke depannya bagaimana caranya itu*

*dimasukkan ke kurikulum, bagaimana anak-anak diajari cara membuat kapal, ukuran untuk nelayan dimasukkan dalam kurikulum sehingga saat keluar SMK sudah bisa buat kapal. Juga mesinnya harus bisa teknisi mesin”.* Lebih lanjut pihak kelurahan menginginkan kurikulum yang sudah ditentukan dari pemerintah jika ada tambahan lagi dari masyarakat bisa dimasukkan namun jika terbatas bisa masuk lewat ekstrakurikuler.

Komite sekolah menyatakan menginginkan penambahan bidang keahlian seperti pariwisata untuk di SMKN 61 mengingat Pulau Tidung merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara, peningkatan kompetensi untuk program keahlian perikanan karena notabene mayoritas penduduk Tidung bermata pencaharian nelayan sehingga diharapkan lulusan dengan program keahlian perikanan juga bisa membantu membina nelayan-nelayan tradisional yang ada dengan memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini juga senada dengan keinginan dari wakasek kurikulum yang disampaikan sebagai berikut:

*“Dari pelayaran dan mesin juga harus diajarkan karena di kepulauan Tidung ini 80% mata pencaharian nelayan pancing. Mesin-mesin, ukuran kapal nelayan juga perlu dimasukkan. Wisata kita dianggap murah, satu orang 300.000 sudah bisa ambil paket wisata dari makan, penginapan, kapal dll. Jika dari makanan bisa diolah dengan baik mungkin harga bisa naik sehingga kesejahteraan warga pulau bisa meningkat”.*

Sekolah tidak membuat kurikulum sinkronisasi. Untuk kelas X telah menggunakan KI-KD di struktur kurikulum yang baru yang mengacu pada SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3305/D.D/KEP/KR/2017 tentang KI dan KD SMK/MAK (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017b). Mulok yang dikembangkan di SMKN 61 adalah pengembangan rumput laut, sekolah juga memiliki muatan kewilayahan. Program keahlian di SMKN 61, yaitu budidaya perikanan, nautika kapal penangkap ikan, administrasi perkantoran dan akuntansi. Hal ini didasarkan atas kebutuhan lapangan seperti

yang dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai berikut: *“Untuk menyentuh langsung ke masyarakat masih berat. Kita berusaha menggalang anak darat karena di daratan kelautan sangat diminati. Anak SMK kecenderungannya ke teknologi dan informatika. Anak-anak yang berminat untuk kelautan tetap ada. Terlihat antusias, setelah anak darat booming jurusan itu, anak laut ikut-ikutan. Dari hari ke hari anak kita perlu disentuh dengan mulok kewilayahan ini yang kita ciptakan, karena laut merupakan wilayah kita. Kita juga sudah membentuk mulai tahun ini meski jurusan akuntansi, administrasi perkantoran, apalagi pelayaran kita sudah berikan kegiatan yang berbaur kewilayahan dan tak ada perbedaan, dari kurikulum ada 2 wajah, bisnis manajemen, perikanan dan kelautan (teknologi kelautan). Sehari-hari belajar administrasi perkantoran kita sebut administrasi perkantoran kelautan, SMKN 61 diproyeksikan untuk AP dan AK secara bertahap akan jadi pariwisata”*.

Lebih lanjut kepala sekolah menyatakan kurikulum tanpa ditunjang kompetensi guru akan percuma.

Seperti yang terjadi di SMKN 61 kekurangan guru produktif. Jika mengacu pada ketentuan minimal untuk 1 jurusan harus ada 2 guru, kondisi di SMKN 61 hanya ada 1 guru untuk 1 jurusan, itu pun honor, jumlah guru yang banyak adalah guru normatif. Kekurangan guru ini ditanggulangi dengan memberdayakan alumnus yang lulusan STP untuk membantu mengajar di sekolah termasuk membina disiplin. Sekolah juga memiliki unit usaha sekolah untuk kegiatan terkait kelautan sehingga siswa bisa meningkatkan kompetensinya. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut: “*Kita punya unit usaha sekolah untuk kegiatan yang berbau kelautan, snorkeling sekarang kita harus mengejar agar kita tak tertinggal*”. Sekolah menginginkan adanya kerja sama untuk mengembangkan kurikulum seperti dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai berikut: “*Target kurikulum, muatan kewilayahan jadi urusan bersama*”.

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum merupakan tanggung jawab sekolah tidak hanya semata mengikuti acuan yang ada dari

Kemendikbud melainkan juga bagaimana karakteristik daerah, proyeksi ke depan apa yang dibutuhkan oleh anak didik dan lulusan saat mengembangkan kurikulum di sekolah.

Sekolah menetapkan seluruh hal yang terkait dengan kompetensi anak di laut akan dipaksakan demi masa depan anak seperti yang dikemukakan oleh kepala program budidaya sebagai berikut: *“Kita akan kembangkan lebih pada bagaimana anak ke depannya diarahkan bagaimana seluruh hal yang terkait dengan kompetensi anak di laut akan dipaksakan demi masa depan anak”*. Kepala sekolah menyatakan akan mewajibkan seluruh siswa tanpa memandang jurusan untuk memiliki kemampuan berenang membaca peta, mampu mengendalikan adanya kondisi darurat di kapal baik dia sebagai pelaut ataupun penumpang. Oleh karenanya setiap siswa diberi latihan disiplin mental dan fisik. Setiap siswa diberi pelatihan intensif kemaritiman selama 3 bulan, yaitu Senin-Sabtu selama 3 jam sehari.

Dengan demikian dapat disimpulkan meski sekolah belum melibatkan SKPD, DUDI dalam

pengembangan kurikulum, namun sekolah telah memiliki visi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah. Unsur lainnya pendukung keterlaksanaan kurikulum selain SDM adalah sarana prasarana. SMKN 61 minim akan sarana prasarana, bahkan tidak memiliki kapal sebagai ciri dari SMK Kemaritiman dan ruang laboratorium, ruang pengolahan yang masih terbatas, meski sekolah memiliki asrama untuk siswa yang berasal dari luar pulau.

b. Kebijakan dan Dukungan

Dukungan terlihat dari KKP melalui program SPI (Sekolah Pantai Indonesia), karena SMKN 61 termasuk salah satu sekolah yang ikut program tersebut. Melalui program SPI, SMKN 61 memperoleh bantuan lima set alat *snorkeling* untuk pemeliharaan dan monitoring hasil kegiatan aksi transplantasi karang.

Selain itu, siswa dilibatkan secara aktif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan menjaga ekosistem pulau dan laut, transplantasi karang sebagai upaya rehabilitasi terumbu karang.

Selain itu, adanya penyuluh KKP yang juga alumnus SMKN 61 dan STP sering kali diberdayakan untuk membantu sebagai tenaga pengajar di SMKN 61. Seperti dinyatakan dari KKP sebagai berikut: *“Kami dari STP, kami ajarkan apa yang kami dapat di sana kami terapkan di sini tanpa adanya kekerasan, sehingga kami pakai istilah taruna/i, kami ada tiga alumni di sini”*. Dukungan dalam bentuk pelatihan kedisiplinan siswa juga diperoleh dari Industri Jasa Maritim (INJASMAR) TNI. Bantuan KKP lainnya adalah menyediakan sarana praktik keramba untuk kerapu sehingga setiap anak bisa praktik.

Dukungan dinas pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana, yaitu pemberian 2 bantuan kapal pada tahun 2009 meski kini kapal sudah tak dapat digunakan sehingga sekolah harus menyewa, dan untuk saat ini SMKN 61 telah mengajukan kembali permintaan bantuan untuk kapal. Dinas pendidikan juga berupaya merenovasi sekolah, hal ini terlihat pada saat kami mengadakan kegiatan verifikasi data awal, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di

asrama yang berfungsi sebagai ruang kelas sementara dikarenakan sekolah sedang direnovasi.

Dukungan lain diperoleh dari DUDI untuk pelaksanaan magang informal, yaitu mengajak warga yang memiliki kapal untuk memberdayakan siswa SMK memperbaiki mesin jika rusak. Dukungan yang diberikan tidak hanya untuk sarana prasarana melainkan juga untuk pendidik, yaitu dari LPTK Makassar dan sertifikat guru berupa undangan untuk mendapat pelatihan *Basic Safety Training* (BST) bagi guru kemaritiman.

Kebijakan yang dirasa masih sangat memberatkan adalah kebijakan untuk sertifikasi baik untuk pendidik maupun peserta didik. Seperti dinyatakan oleh kaprog budidaya sebagai berikut: “*BNSP tentang sertifikasi sudah 2 tahun kami tak melakukan sertifikasi, 2 tahun lalu kita ikut program TUK 36 siswa kami memiliki sertifikasi, kita tak punya ruang olahan khusus*“. Lebih lanjut kepala sekolah menyatakan sebagai berikut: “*Syarat sertifikasi itu SDM bagaimana, sertifikasi lembaganya bagaimana. Untuk kompetensi guru saya rasa semua sudah baik namun kompetensi*

*untuk jadi instruktur yang belum (asesor) itu perlu dipenuhi. Untuk jadi asesor dibutuhkan banyak biaya, untuk 1 kegiatan jadi asesor diperlukan banyak biaya bisa mencapai 10 juta untuk 1 kali ikut kegiatan karena selama 2 minggu ada materi khusus makan dan lainnya. Sehingga karena mahal kami lebih menunggu adanya undangan dari luar. Di sekolah kami hanya ada 1 orang sehingga kita juga belum bisa untuk melakukan sertifikasi pada peserta didik”.*

c. Kompetensi Lulusan SMK dan Dunia Kerja

Secara umum lulusan SMKN 61 terserap oleh dunia kerja, meski untuk lulusan SMK untuk jurusan pelayaran umumnya bekerja tidak sesuai kompetensinya dikarenakan harus mengikuti sertifikasi, sehingga tak mengherankan jika di SMKN 61 hanya 2 orang yang melanjutkan mengambil sertifikasi seperti dituturkan oleh kaprog budidaya sebagai berikut: *“Dari 4 tahun lulusan ya hanya 2 orang yang melanjutkan mengambil sertifikat untuk bisa jadi pelaut karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi”.* Persyaratan ini salah satunya adalah biaya,

sedangkan *mindset* orang tua juga masih harus diubah karena orang tua yang umumnya 80% bermata pencaharian sebagai nelayan menginginkan anaknya bekerja sebagai pekerja kantoran. Tak mengherankan apabila kebanyakan siswa yang mengambil jurusan NKPI berasal dari luar pulau. Sekolah melakukan promosi ke luar pulau untuk lulusan SMP agar mau melanjutkan ke SMKN 61 Jakarta. Karena animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di jurusan pelayaran sangat kecil apabila dibandingkan dengan animo masyarakat di luar pulau.

Lebih lanjut, secara umum lulusan SMKN 61 tidak ada yang menganggur, umumnya mereka berwirausaha, yang nautika ikut membuka kerambah, untuk jurusan budidaya juga ada yang melanjutkan. Keharusan sertifikasi ini menyebabkan lulusan SMK terkesan tidak siap pakai dan memerlukan waktu dan biaya yang tak sedikit untuk bisa bekerja sesuai kompetensinya. Hal senada diungkapkan oleh kepala sekolah, *“Untuk lulusan yang melanjutkan kuliah memang ada namun kebanyakan tak linier. Yang tak*

*melanjutkan jadi pelaut lebih karena banyaknya biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan. Bukan berarti mereka tidak loyal, saya yakin semua anak yang sudah masuk perikanan sudah punya jiwa untuk jadi pelaut namun karena terbentur kondisi saja”*. Alumni juga memberdayakan alumnus atau adik-adik kelas yang belum bekerja. DUDI belum dilibatkan untuk penyaluran lulusan SMK sebagai tenaga kerja seperti dikemukakan oleh kepala sekolah, *“Belum ada penyaluran untuk lulusan”*. Keterlibatan DUDI hanya sebagai tempat prakerin.

SMK Kemaritiman di Pulau Tidung memerlukan banyak bantuan untuk pemberdayaan sekolah. Bantuan utama yang dibutuhkan adalah bantuan kebijakan yang terintegrasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat kebijakan yang membuat lulusan dapat langsung bekerja setelah sekolah, sesuai dengan fungsi pendidikan vokasi. Sekolah juga memerlukan bantuan sarana dan prasarana untuk membuat pembelajaran maksimal. Sekolah belum dapat meramu kurikulum yang bersaing dan sesuai

dengan kebutuhan lingkungan sehingga menjadi nilai tambah. Sekolah juga meningkatkan keterlibatan DUDI untuk pembuatan kurikulum dan penyaluran lulusan sehingga aspek pembuatan kurikulum dapat sesuai dengan kebutuhan sehingga daya serap lulusan SMK kemaritiman semakin tinggi.

## **B. Sulawesi Selatan**

### **1. Temuan**

#### **a. Cara Mengembangkan Kurikulum**

- 1) Standar kompetensi lulusan diatur secara berbeda oleh 2 kementerian (Kemendikbud dan Kemenhub).
- 2) Khusus untuk keahlian profesi *Nautica*, Kemenhub mengacu pada standar IMO yang dikeluarkan PBB. Standar IMO (Kemenhub) mewajibkan lulusan memiliki sertifikat (*basic safety training*). Standar IMO mengatur standar kompetensi, standar pendidik dan standar di bidangnya.
- 3) Kemenhub juga memiliki standar pembelajaran dengan mewajibkan sekolah memiliki

simulator yang sesuai standar IMO untuk menentukan sekolah yang akan diberikan *approval*. Harga simulator mencapai 700 juta. Guru-guru yang akan mengajarkan penggunaan simulator juga harus diberikan pelatihan.

- 4) Untuk standar kompetensi lulusan, ujian negara untuk siswa menggunakan sistem komputer. Pertanyaan yang diajukan banyak terkait dengan teori. Padahal, pengaturan jumlah praktik dan teori diatur dengan ketentuan untuk kelas 10 adalah 25% praktik 75% teori; kelas 11 adalah 50% praktik dan 50% teori; dan kelas 12 adalah 75% praktik dan 25% teori. Dengan demikian, ketika ujian, siswa sudah tidak terbiasa dengan teori.

b. Aspek yang Diperhatikan dalam Pengembangan Dokumen Kurikulum dan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kurikulum

- 1) Ketika membuat kurikulum agrobisnis, kekuatan dicari dengan melihat kearifan lokal. Perikanan menjadi mulok dengan kerja sama dengan Balai Benih Ikan tawar (BBI). Yang mulok, lebih banyak dijadwalkan di

ekstrakurikuler.

- 2) Untuk *Nautica*, pembuatan kurikulum menekankan pada keahlian profesi, dan 100% mengacu pada aturan Kemenhub.
- 3) Kurikulum yang dibuat mencakup pelayaran dan penangkapan ikan mengacu pada standar IMO, Direktorat PSMK dengan silabus yang sudah disiapkan. Pembelajaran dikembangkan oleh guru-guru perikanan.
- 4) Kurikulum juga ditetapkan dengan melihat kondisi lingkungan sekolah. Misalnya, SMKN 9 Makassar sesuai lingkungannya, mengembangkan kurikulum perikanan air payau. Untuk yang terletak jauh dari laut, yang dikembangkan adalah perikanan air tawar.
- 5) Sekolah juga bertanya pada dunia industri sebelum menetapkan kurikulum supaya kurikulum yang diberikan sesuai kebutuhan dunia usaha. Misalnya, SMKN 9 Makassar mengarahkan kurikulum pada pengelolaan udang atas masukan DUDI.
- 6) Pembelajaran lebih banyak di lapangan. Teori diajarkan sambil praktik di lapangan/laboratorium.

- 7) Kurikulum yang selalu berubah membuat guru-guru kebingungan. Di sekolah ada 3 kurikulum, yaitu K-13, KTSP, dan K13 revisi.
- c. Kebijakan (Pusat/Daerah/Pihak Lain) dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di SMK Kemaritiman
- 1) Minat siswa SMP masuk SMK masih rendah karena alumninya belum dapat ditampilkan sebagai profil sukses. Diperlukan promosi supaya lulusan SMP berminat. Namun, hal itu belum dilaksanakan.
  - 2) Untuk bidang perkapalan, calon siswa membayangkan kapal tradisional sehingga tidak meningkatkan minat belajar di SMK. Setiap tahun sudah ada sosialisasi dari SMP tetapi calon siswa masih bingung.
  - 3) Perlu mengedukasi orang tua untuk mengubah *mindset* ukuran keberhasilan lulusan SMK. Orang tua tidak mengizinkan anaknya bekerja di daerah industri karena perindustrian banyak terletak di lokasi penyangga. Oleh karena bekerja jauh, orang tua tidak mengizinkan.
  - 4) Kendala peralatan/fasilitas membuat jumlah

sekolah pelayaran semakin berkurang.

- 5) Kebijakan dinas pendidikan membantu tetapi kebijakan dinas perhubungan membunuh. Ketidaksinkronan kebijakan Kemenhub dan Kemendikbud membuat sekolah mengalami kebingungan. Misalnya, PSMK adalah kecakapan bahari sedangkan. Kemenhub adanya *Nautica* dan *Technica*. Dari Kemenhub hanya menggunakan yang sesuai tetapi Kemendikbud tidak ada masalah. Kebijakan normatif dan adaptif saja.
- 6) Pembayaran sekolah dinaikkan karena biaya pelayaran tinggi.
- 7) Siswa yang sebagian besar dari lokasi SMK itu, tetapi yang banyak berkembang dari sekitar daerah. Motivasinya yang penting sekolah.
- 8) Siswa yang bekerja sesuai kompetensi hanya 20%. Yang lain banyak bekerja di tempat tidak sesuai kompetensi.
- 9) Masyarakat umumnya memilih pendidikan yang murah dan gratis.
- 10) Secara nasional, guru harus ikut TOT untuk menjadi *assessor*. Biayanya 8 juta per orang. Meskipun guru sudah TOT (*assessor*),

sertifikasi tetap harus dari Lembaga Sertifikasi Pendidikan (LSP). Tidak semua sertifikat BST LSP diterima karena harus sesuai IMO.

11) Sekolah yang belum memiliki simulator terancam tidak mendapatkan *approval*. Jika sekolah belum *approved*, siswanya harus bersekolah dari kelas 1 lagi, setelah itu berlayar, dan nanti turun saat mau ujian.

d. Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian, DUDI, Orang Tua dan Lainnya dalam Penyelenggaraan SMK Kemaritiman

1) Sertifikat di *Nautica* seperti halnya Surat Izin Mengemudi (SIM). Jadi, sangat dibutuhkan oleh lulusan. Sudah pernah ada program bantuan BST, buku pelaut, dan tawaran sertifikasi gratis (dari PIP) banyak diberikan gratis (program dari Kemenhub), yang mengikuti hanya sedikit karena kendala sosialisasi.

2) Ada MoU ke Kementerian Kelautan bekerja sama dengan balai latihan di Sumut, Banyuwangi untuk simulator karena biayanya tinggi.

- 3) Ada bantuan dari Direktorat PSMK untuk pengembangan kurikulum saja, Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk jurusan mesin dan *Nautica* disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan alat.
- 4) Sebenarnya banyak kebutuhan dari dunia industri/kapal. Rata-rata sekolah sudah memiliki kerja sama dengan perusahaan. Namun, masih ada kendala pada BST dan buku pelaut. Uang 2 juta untuk BST dan buku pelaut dirasa berat untuk siswa.
- 5) Dukungan Pemda, ada janji bantuan simulator, bantuan tanah, dan dana dari provinsi. Dari pusat, ada lembaga untuk memberikan pelatihan fokus kemaritiman dengan keahlian ganda.
- 6) Ada bantuan laboratorium dan beasiswa dari kementerian. Jumlahnya berbeda tergantung kelas. Untuk kelas 12, beasiswa bisa sampai 1 juta per semester.
- 7) Soal pengajar yang tanpa latar belakang pelaut, sudah disiapkan TOT. Pengajar dari Lantamal, AL diminta membantu pelayaran. Jika membutuhkan bantuan, diminta berkoordinasi. Tempat praktik disesuaikan dengan keberadaan

kapal sebagai ruang praktik. Sekolah juga ada yang dijanjikan kapal perang yang tidak terpakai untuk dapat digunakan sebagai tempat praktik.

- 8) Masyarakat cukup mendukung. Namun, sekolah juga berharap jika alumni mudah terserap maka dukungan masyarakat akan lebih besar. Dukungan masyarakat untuk perikanan didapatkan dengan sosialisasi sehingga jumlah siswa semakin bertambah dan bantuan juga makin banyak.
- 9) Potensi yang dimiliki Sulsel sangat besar. Ada beberapa sekolah yang menangani perikanan, perkapalan juga perguruan tinggi. Namun, LPTK Jurusan Pendidikan Kelautan yang fokus pengajaran belum ada. Jadi, pengajarnya praktisi (kapten-kapten kapal). Tantangannya, guru-gurunya lebih banyak guru honor.
- 10) Fasilitas masih kurang. Ada beberapa sekolah mati suri. Jumlah siswanya antara 20 sampai 50.
- 11) LPTK ingin guru-guru profesional.
- 12) Lapangan kerjanya sudah mulai baik. Mulai ada siswa yang punya usaha di Sorong dan

memberdayakan adik kelas untuk bekerja di sana. Banyak yang mempromosikan beasiswa di jurusan perikanan.

- 13) Yang bekerja di luar bidangnya juga ada. Banyak yang lanjut studi ke UNHAS Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan beasiswa. Sebagian sudah menjadi calon-calon dosen. Sekitar 50% lulusan SMK lanjut kuliah, 20% bekerja di perikanan. Sisanya bekerja tidak sesuai bidang perikanan.
- 14) Di SMKN 1 Maros, berlokasi dekat sawah. Dengan K-13, siswa di kelas 1 berjumlah 80 orang, sudah mulai banyak peminat. Banyak siswa dari daerah dan lebih sedikit anak nelayan.
- 15) Ada pendidikan profesi guru, tetapi banyak alumni pelayaran yang memilih tidak bekerja di dunia industri maritim karena gaji.
- 16) Yang *Nautica* banyak yang ingin bekerja sebagai pelaut. Ada banyak MoU dengan Jepang dan Australia. Namun, sertifikat yang menjadi persyaratan membutuhkan biaya. Ekonomi masyarakat lemah. Dengan kata lain, ada banyak permintaan lulusan tetapi alumni

tidak ada yang merespon.

- 17) Banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya yang lulusan SMK kemaritiman untuk berkecimpung di dunia perikanan karena berpandangan bahwa mengelola tambak/ikan bukan citra sukses, hanya mengulang profesi orang tua, yang tidak memerlukan pendidikan untuk bergelut dalam perikanan.
- 18) Lulusan SMK juga ada yang mengalami kendala untuk terserap dalam dunia kerja yang sesuai karena orang tua tidak ingin anaknya bekerja jauh.

## **2. Pembahasan**

### **a. Kurikulum**

Umumnya sekolah telah memperhatikan karakteristik daerah, lingkungan dengan mempertimbangkan pula kondisi sosial budaya, kearifan lokal dan tuntutan dunia kerja dalam mengembangkan. SMKN 9 Makassar sesuai lingkungannya, mengembangkan kurikulum perikanan air payau karena dekat dengan laut, sedangkan SMKN 1 Maros yang terletak jauh dari laut mengembangkan perikanan air tawar.

Dalam penyusunan kurikulum sekolah juga meminta pertimbangan DUDI seperti diungkapkan oleh guru dari SMKN 9 Makassar sebagai berikut: *“Untuk SMKN 9 memiliki kompetensi perikanan air payau, sedangkan SMKN 1 Maros itu perikanan air tawar. Di kurikulum yang ada memang sudah terbagi ada air payau, tawar, dan air asin. Sementara ini sudah ada kami kerja sama dengan industri dan berdiskusi industri inginnya lulusan kami bekerja di mana? Sehingga kurikulum yang akan kita ajarkan disesuaikan dengan keinginan dunia industri. Yang dari udang ingin kami lebih perdalam tentang udang. Jadi, budidaya ada beberapa misal bandeng, udang, dan lain-lain. Namun, karena dunia industri lebih ingin ahlinya di udang maka kita lebih banyak praktik ke udang dibandingkan species yang lain”*.

Selain itu, ada pula sekolah yang menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam mengembangkan kurikulum, seperti SMKN 1 Maros yang bekerja sama dengan Balitkanta (Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau) dan BBI. SMKN 1 Maros menyadari potensi daerahnya yang

jauh dari laut sehingga menitikberatkan pada agrobisnis. Umumnya sekolah membuat sinkronisasi kurikulum seperti yang juga dilakukan oleh SMK Pelayaran Katangka yang memiliki program keahlian kapak niaga seperti pernyataan kepala sekolah sebagai berikut: *“Untuk normatif dan adaptif ke Kemendikbud, sedangkan untuk kurikulum program keahlian profesi 100% kami adopsi dari Kemenhub (barang jadi), yang kami revisi hanya yang umum (normatif, adaptif) yang bersifat lokal (mulok) lebih banyak kami jadwalkan di ekstrakurikuler”*.

Hal yang sama juga dilakukan oleh SMKN 9 Makassar untuk jurusan NKPI, standar kurikulum mengacu pada Kemenhub yang menggunakan standar IMO, untuk silabus sudah disiapkan oleh MGMP namun sekolah melakukan pengembangan pembelajaran sendiri. Seperti dikemukakan oleh salah satu perwakilan SMKN 9 sebagai berikut: *“Di SMK 9 kami sudah ada silabus yang sudah disiapkan namun pengembangan pembelajaran dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ada*

*MGMP, ada acuan namun kami mengembangkan sendiri di lapangan”.*

Sekolah juga menginginkan agar kurikulum dari Kemendikbud tidak cepat berubah seperti diungkapkan oleh perwakilan SMKN 9 sebagai berikut: *“Kami ingin tekankan agar kurikulum tak berubah-ubah, sebentar KTSP (Kurikulum 2006), Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 revisi. Kita jadi bingung dalam sekolah ada 3 macam”.*

Hal senada diungkapkan oleh kepala sekolah dari SMKN 1 Maros yaitu: *“Awalnya KTSP, saat jadi sekolah rujukan kami diharapkan menggunakan K-13, dalam perjalanan setahun kembali ke KTSP sekarang ke K-13 revisi. Ini membingungkan sehingga kita tak bisa menerapkan kurikulum yang sebenarnya. Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh kepala sekolah dari SMK Pelayaran Katangka, “Kami dari pelayaran menunggu dari perhubungan. Normatif dan adaptif kami sesuaikan dengan Diknas”.*

SMK Kemaritiman khususnya Program Studi Keahlian Pelayaran Kapal Niaga memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan

program studi keahlian yang lain, sebab dalam proses pendidikan dan sertifikasi kompetensinya mengacu pada dua kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenhub. Persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) bahwa siswa SMK Pelayaran yang dapat mengikuti sertifikasi Ujian Keahlian Pelaut (UKP) adalah siswa dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolahnya sudah di-*approve* oleh Dirjen Hubla.

Banyak SMK Pelayaran terpaksa tutup karena tidak ter-*approve* oleh Dirjen Hubla. Untuk mendapatkan *approval*, sekolah harus memenuhi 8 standar pendidikan yang dimiliki oleh Dirjen Hubla. Hal tersebut serupa dengan 8 standar yang dimiliki oleh Kemendikbud. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah sarana prasarana. Untuk SMK Pelayaran, sarana yang harus dipenuhi dan menyerap banyak dana adalah simulator. Belum semua sekolah pelayaran memiliki simulator karena harganya sangat mahal. Seperti yang dinyatakan kepala sekolah SMK Pelayaran Katangka, “*Simulator yang diwajibkan ke kami*

*agar lulus sertifikasi harus beli 7 M. Yang kami miliki sementara dirakit. Yayasan kami masih berusaha untuk memenuhinya dan kami tak bisa berharap dari bayaran siswa”.*

Kemendiknas mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran. Akibatnya, siswa SMK yang telah lulus harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan kompetensi kepelautan. Minimal Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pendidikan dasar BST dan mengambil buku pelaut sebelum dapat bekerja di kapal atau pergi melaut sehingga dapat diakui secara internasional.

Sertifikasi tak hanya harus diikuti oleh siswa melainkan juga untuk guru, guru produktif khususnya untuk mata pelajaran kejuruan untuk pelaut harus memiliki sertifikat TOT yang terdiri atas: TOT 6,09 (pembelajaran), TOT 3,12 (pengujian) dan TOT 6,10 untuk instruktur simulator dengan biaya yang tak sedikit. Seperti

dikemukakan dari P4TK Perikanan dan Kelautan, *“Banyak syarat untuk diakui jadi guru kelautan. Kami melatih guru perikanan BST guru di STP Pasar Minggu kami kirim guru 60 orang ke sana, di lembaga Diklat perhubungan itu ada TOT. Harus TOT dulu baru BST, guru kelautan perikanan masih kurang. Jurusan di LPTK juga belum ada untuk keguruan itu yang ada hanya guru keilmuan murni”*.

Guru produktif untuk kelautan dan perikanan memang masih minim sehingga P4TK perikanan dan kelautan serta sekolah memanfaatkan TNI dari Lantamal sebagai pengajar. Hal lain terkait dengan dualisme kurikulum adalah adanya 2 jenis ujian yang harus diikuti oleh siswa, yaitu UN dari Kemendikbud dan ujian negara. Seperti diungkapkan oleh Kepala SMK Pelayaran Katangka sebagai berikut: *“Terkait dengan sistem UN, di Kemenhub istilah ujian negara, di Kemendikbud Ujian Nasional (UN). Padahal ujian negara sama dengan ujian nasional. Tahun ini berlaku sistem CBT jika kita pelajari di kurikulum untuk tingkat 1, 25% praktik, 75% teori. Kelas 2*

50:50, tingkat 3 kebalikan tingkat 1, 25% untuk persiapan UN. Untuk ujian negara menggunakan sistem komputer sama dengan sistem Ujian Nasional. Kami coba sampaikan ada yang tak nyambung karena anak kita di pelayaran banyak praktik kompetensi namun saat diuji UN, menggunakan teori". Untuk program keahlian perikanan, sertifikasi mengacu pada standar SKKNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

b. Kebijakan dan Dukungan

Untuk Sulawesi Selatan terlihat sudah ada dukungan dari *stakeholder* untuk SMK Kemaritiman. Seperti dukungan dari Lantamal, TNI AL untuk menyediakan tenaga pengajar, alat dan tempat untuk praktik sehingga kekurangan tenaga pengajar dan sarana prasarana yang sesuai dengan keilmuan untuk pelayaran di Makassar dapat tertangani.

Bantuan sarana prasarana seperti ruang praktik siswa juga diberikan oleh direktorat PSMK, dan juga penunjukan sebagai sekolah rujukan, salah satunya untuk SMK Katangka, seperti

dikemukakan sebagai berikut: *“Dari direktorat sudah cukup terbantu ya kami bahkan dapat SK sebagai sekolah rujukan .... untuk pengembangan saja, gedung pertunjukan seni budaya, RPS (Ruang Praktik Siswa)”*.

Selain itu, juga diberikan bantuan beasiswa dengan anggarannya berbeda per kelas. Seperti dinyatakan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Maros sebagai berikut: *“Untuk pemerintah pusat tak kalah pentingnya untuk SMKN 1 kami dibuatkan laboratorium dan semua siswa dapat dukungan beasiswa dari kementerian hanya berbeda saja anggarannya per kelas. Misal kelas 10, dapat 210 per semester, kelas 11-12, 1 juta per semester, bantuan pemerintah daerah cukup luar biasa, karena SMK kami mendapatkan bantuan RPS yang anggaran hampir 1 M dari pemerintah daerah”*.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Kepala P4TK Perikanan dan Kelautan menyatakan: *“Pemerintah Sulsel rekomendasi akan beli 10 simulator untuk SMK Kelautan dan Perikanan, akan melatih guru perikanan dan kelautan, rekomendasi untuk daerah termasuk lembaga Diklat itu tanah provinsi 11*

*hektar. Dukungan sarpras, dukungan pusat sebagai tindak lanjut Nawacita itu lahir Lembaga Diklat Kemaritiman, implementasi Inpres Nomor 9, Tahun 2016 menyiapkan guru keahlian ganda. Guru-guru adaptif dan normatif yang berlebih di satu sekolah, kita latih 1 tahun untuk bisa mengajar Nautica mengingat formasi CPNS guru belum terbuka. Guru adaptif, normatif yang linier kita latih untuk jadi guru kemaritiman dan sarana prasarana juga diberikan, SDM\*.*

Adanya pemberian bantuan juga dinyatakan oleh guru dari SMKN 9 sebagai berikut: *“Sekolah menerima bantuan dari pusat maupun dari provinsi, bangunan, beasiswa”*. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Sekolah SMKN 1 Katangka sebagai berikut: *“Bantuan pemerintah daerah cukup luar biasa, karena SMK kami mendapatkan bantuan RPS yang anggaran hampir 1 M dari pemerintah daerah”*.

Dukungan untuk SMK Kemaritiman juga terlihat dari perguruan tinggi seperti diungkapkan oleh guru dari SMKN 9 Makassar: *“Ada dari program gratis untuk BST dan buku pelaut dari PIP bukan*

*hanya untuk lulusan SMK tapi juga masyarakat umum*". Kerja sama dengan perguruan tinggi juga diakui oleh SMKN 1 Maros sebagai berikut: *"Ada kerja sama dengan Unhas untuk program kelautan dengan perikanan dan kelautan berupa pemberian beasiswa bagi siswa sehingga 50% lulusan SMKN 1 Maros Jurusan Kemaritiman melanjutkan ke perguruan tinggi"*.

Kemenko Kemaritiman juga mengupayakan agar sekolah pelayaran yang sudah mati suri bisa kembali hidup. Seperti yang dinyatakan Kepala SMK Katangka sebagai berikut: *"Kami berapa kali dipanggil, Rakor bahkan staf ahli meminta kami menyampaikan kesulitan di daerah. Tak mau melihat ada sekolah SMK Pelayaran yang ditutup, menurut Pak Luhut apa arti negara maritim jika sekolah ditutup. Saya diberitahu agar yang bagaimana yang sekolah ditutup kemarin untuk dibuka kembali. Selain itu, juga penyediaan sarana untuk pelatihan seperti Balai Diklat Medan, Banyuwangi, dan lainnya"*.

Dukungan P4TK adalah melalui pelatihan BST untuk guru perikanan di STP Pasar Minggu,

sekolah mengirimkan 60 orang guru, seperti dinyatakan sebagai berikut: “*Kami melatih guru perikanan BST, guru di STP Pasar Minggu kami kirim guru 60 orang ke sana, di lembaga Diklat Perhubungan itu ada TOT. Harus TOT dulu baru BST. Hari ini kami TOT 30 orang guru, pelatih dari pelayaran juga kami hanya membayar 8 juta per orang. Gelombang pertama 30 orang, gelombang kedua 60 orang*”.

KKP melalui Balaikanta juga membantu untuk pengembangan kurikulum untuk agrobisnis seperti yang terjadi di SMKN 1 Maros. Selain dukungan dari *stakeholder* juga terdapat dukungan dari masyarakat meski tidak besar.

Seperti dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Maros sebagai berikut: “*Mindset masyarakat bahwa jika masuk perikanan identik dengan tukang empang, orang tua tak mau menyekolahkan di tempat kami. Lulusan bukan sebagai tukang empang. Jika itu yang dipikirkan oleh masyarakat hal itu tak benar. Karena lulusan yang justru paling cepat mandiri adalah lulusan agrobisnis*”. Hal yang serupa dinyatakan oleh guru SMKN 9

sebagai berikut: *“Pengertian masyarakat depan untuk lulusan perikanan dipikir kerja di tambak, tak perlu sekolah ... orang tua juga umumnya masih keberatan jika anak perempuannya yang mengambil jurusan NKPI pergi melaut atau anaknya bekerja di luar daerah”*.

Kepala SMK Katangka menyatakan bahwa: *”Dukungan yang diberikan masyarakat umumnya ikut-ikutan saja, hanya masyarakat kami lebih suka yang jika ada yang gratis atau murah. Jika mahal ya tidak mau”*.

Dapat disimpulkan umumnya dukungan untuk SMK Kemaritiman telah diberikan oleh *stakeholder* sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Meski untuk Kemendikbud dan Kemenhub terkesan ada dua kebijakan yang sama untuk penetapan standar, namun dua standar ini harus dijalankan oleh sekolah dengan sanksi yang cukup memberatkan seperti penutupan sekolah dan tidak boleh menerima siswa apabila tidak *ter-approve* dan hal ini menjadi *boomerang* di SMK Kemaritiman.

### c. Kompetensi Lulusan SMK dan Dunia Kerja

SMK merupakan sekolah menengah kejuruan yang diproyeksikan untuk menyiapkan peserta didik yang handal dan memiliki *skill* untuk dapat bersaing di dunia kerja baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausaha.

Secara umum, lulusan SMK Kemaritiman terserap oleh dunia kerja meski belum tentu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Umumnya untuk bidang keahlian kemaritiman baik untuk Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Kapal Penangkap Ikan, Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga belum tentu melanjutkan untuk mengambil sertifikasi yang merupakan syarat mutlak untuk lulusan SMK untuk dapat diakui secara internasional saat bekerja di kapal. Oleh karena saat bekerja bukan ijazah yang diperlukan tetapi sertifikat yang berlaku internasional yang diakui sehingga tak mengherankan apabila lulusan SMK Kemaritiman yang kemudian mengambil sertifikasi disamakan kualifikasinya dengan lulusan SMP kemudian mengikuti Diklat untuk mengambil sertifikasi.

Seperti dikemukakan oleh perwakilan SMK Katangka: *“Yang tamat SMP masih ambil sertifikat namanya ya penjenjangan. Yang SMK namanya pembentukan. Pelaut berlayar 3 bulan dapat ijazah dasar”*. Keharusan sertifikasi ini menyebabkan bertambahnya waktu belajar untuk siswa SMK Pelayaran, seperti dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMKN Katangka sebagai berikut: *“SMK Pelayaran kan dapat 2 ijazah ya yang dikeluarkan Kemendikbud dan Kemenhub. Ijazah SMK-nya memang 3 tahun namun ya harus lanjut. Rata-rata 5 tahun ya. Karena 3 tahun sekolah, 2 tahun lanjutannya. Prosesnya lanjut lagi untuk ijazah laut. Proses itu tahun pertama untuk berlayar, di tambah lagi 1 tahun”*. Hal ini menyebabkan lulusan SMK Kemaritiman terkesan tidak siap pakai. Biaya sertifikasi untuk lulusan SMK juga besar. Seperti diungkapkan oleh perwakilan SMKN 9 Makassar sebagai berikut: *“Masyarakat ekonomi lemah untuk BST 2 juta lebih, buku pelaut 300 ribuan. BST dan buku pelaut. Itu wajib dan yang jadi kendala untuk orang tua karena posisi orang tua hanya nelayan. Uang 22 juta itu berat. Asal ada BST dan buku pelaut, perusahaan banyak yang minta”*.

Selain itu, orang tua yang memiliki anak perempuan juga umumnya tak mengizinkan anaknya pergi berlayar. Hal ini disayangkan karena untuk bidang keahlian nautika termasuk yang favorit, seperti dikemukakan oleh perwakilan SMKN 9 Makassar sebagai berikut: *“Nautika itu favorit karena setelah keluar langsung berlayar atau masuk PIP, kalau agrobisnis perikanan akan kerja di tambak”*. Hal serupa juga dijelaskan oleh Dosen PIP: *“Mindset di masyarakat, masyarakat melihat hasil ambil contoh. Saya dulu pelaut. Mindset ini dilihat pelaut banyak uang”*. Untuk Jurusan Perikanan (Agrobisnis) umumnya berwirausaha dan paling cepat mandiri seperti diungkap oleh Kepala SMKN 1 Katangka sebagai berikut: *“Dari semua jurusan SMK 1 Maros, yang paling cepat mandiri adalah dan berkesinambungan dengan SMK 1 adalah perikanan. Lulusan bukan sebagai tukang empang”*. Tak mengherankan apabila sudah beberapa lulusannya yang berwirausaha bahkan memiliki usaha di Manokwari dan mempekerjakan pula adik-adik kelas. Namun, hal berbeda terjadi di SMKN 9 Makassar yang berada di dekat

pemukiman nelayan, untuk Jurusan Agrobisnis sedikit peminat karena umumnya orang tua berpikir anak akan kerja di tambak atau di perahu sehingga tak perlu sekolah.

Hanya 20% lulusan yang bekerja sesuai kompetensi keahlian yang diambil di SMK. Seperti dikemukakan oleh Kepala SMKN 9 sebagai berikut: *“Hanya sekitar 20% yang bekerja sesuai kompetensi, yang lanjut wiraswasta hanya kecil. Memang kebanyakan langsung bekerja namun tak sesuai dengan kompetensi. Ada juga yang kuliah. Yang terbanyak memang bekerja namun tak sesuai kompetensi. 50% lanjut kuliah, 20% sekolah, 30% menyebar”*. Seperti diungkapkan pula oleh perwakilan SMKN 9 sebagai berikut: *“Di lingkungan SMKN 9 lingkungannya industri, 80% dari lulusan kita tak terserap di perikanan mereka kerja di industri yang tak sesuai dengan kompetensi”*.

Sekolah umumnya juga telah menjalin kerja sama dengan DUDI seperti diungkapkan oleh perwakilan SMKN 9 Makassar sebagai berikut: *“Setelah lulus SMK 9 mereka langsung bekerja kami fasilitasi*

*join dengan perusahaan Jepang dan Australia. Perusahaan itu mereka sudah bisa terima. Namun harus ambil buku pelaut dan BST (ikut sertifikasi terlebih dahulu)”. Senada dengan pernyataan ini, M dari SMK Katangka menyatakan sebagai berikut: “Yang susah mungkin jika guru SMKN 1 belum menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran. Di kami sudah ada kerja sama dengan kami. Begitu mereka butuh, kami bisa langsung menyalurkan. Bahkan kami kadang tak bisa bantu. Karena biasanya saat kapal sandar ada kru yang turun, dan harus dicari pengganti. Jadi menurut saya itu bukan kondisi global”.*

Dapat disimpulkan bahwa untuk SMK Kemaritiman umumnya terserap oleh dunia industri meski masih banyak yang tak sesuai dengan kompetensi, terlebih untuk lulusan SMK Kemaritiman. Diperlukan sinkronisasi standar lulusan termasuk juga standar kompetensi untuk Kemendikbud dan Kemenhub agar ada penyeragaman standar, anak yang lulus UN tak perlu mengikuti ujian negara, UN = ujian negara dan tak perlu ikut sertifikasi namun bisa langsung

bekerja melaut sehingga tak harus menempuh pendidikan tambahan.

## **C. Jawa Timur**

### **1. Temuan**

#### **a. Cara Mengembangkan Kurikulum**

- 1) Sekolah membuat dua kurikulum, yaitu dari Kemendikbud dan Kemenhub. Keduanya mempunyai standar berbeda. Pihak sekolah berharap, termasuk di dalam MGMP agar ada kesamaan di sekolah.
- 2) Setiap jurusan menentukan standar kompetensi lulusan secara berbeda karena tuntutan di dunia kerja. Ada yang persyaratannya lebih sederhana tetapi juga ada yang menuntut kualifikasi lebih banyak. Jurusan Kapal Penangkap Ikan memiliki standar kompetensi yang lebih sederhana dibandingkan Jurusan Pelayaran. Untuk Jurusan Kapal Perikanan: buku perikanan, buku pelaut dan BST, dan Atkapi 2 (ahli teknika mesin) itu bisa diambil pada saat siswa bersekolah. Sekolah yang menangani Jurusan Pelayaran mempunyai

kewajiban untuk mengantarkan siswanya bekerja di sektor pelayaran sesuai dengan standar akreditasi yang dilakukan sesuai dengan prasyarat IMO karena prasyarat IMO digunakan di dunia kerja.

- 3) Di SMK Grati ada Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Kurikulum yang ada pada Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar itu ada satu kurikulum menggunakan Kemendikbud meskipun kurikulum kelas 10 dengan 11 itu spektrumnya tidak sama. Bila kelas 10 menggunakan Kurikulum 2013, kelas 11 masih menggunakan kurikulum yang lama.
  - 4) Di Kemendikbud ada 8 standar. Kemenhub juga memiliki 8 standar. Namanya juga sama, tetapi nomor peraturannya berbeda. Standar lulusan harus mempunyai sertifikasi pelayaran yang harus TOT.
- b. Aspek yang Diperhatikan dalam Pengembangan Kurikulum dan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kurikulum
- 1) Di praktik kerja industri, kami mencoba memadukan kurikulum dari berbagai instansi

baik Kemendikbud maupun Kemenhub.

- 2) Kompetensi pengajar juga disesuaikan kualifikasinya dengan mendapat TOT tersendiri.
- 3) Sekolah melakukan kerja sama dengan industri, perguruan tinggi, dan instansi terkait.
- 4) Melakukan sinkronisasi antara mata pelajaran yang di sekolah dengan kebutuhan di industri.
- 5) Melakukan studi banding ke sekolah–sekolah yang mempunyai kompetensi keahlian yang sama.
- 6) Mempunyai ICT *center* agar mampu menerima dan menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat.
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana.
- 8) Sekolah mempertimbangkan kebutuhan kompetensi di masa depan, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan karakteristik lingkungan. Pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa wirausaha dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

c. Kebijakan (Pusat/Daerah/Pihak Lain) dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di SMK Kemaritiman

- 1) Untuk kurikulum ada dua, dari dinas pendidikan dan perhubungan laut. Dari perhubungan laut itu dari IMO. Ada dua terakreditasi dari diknas A, B, C sedangkan dari hubungan laut itu ada *approval*. Standar-standar dari Kemendikbud menggunakan KI, KD. Kemenhub menggunakan PK 02 (Peraturan Kepala Badan). Di dalamnya ada kode materi, ada aplikasi 2.1, aplikasi 1.1 yang merupakan mata pelajaran dasar keahlian sedangkan mata pelajaran kompetensinya mulai dari 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya.
- 2) Perbedaan standar kualifikasi Kemendikbud dan Kemenhub membuat sekolah bingung menentukan kurikulum. Kurikulum masa belajar dari Kemendikbud yang ada masih kurang sinkron dengan standar kelulusan dari Kemenhub. Mengenai sertifikat pasca siswa lulus yang harus didapatkan dari Kemenhub.
- 3) Jurusan Agrobisnis Perikanan Air Tawar

menggunakan kurikulum Kemendikbud. Yang tidak sama di mapelnya, kami menggunakan 2013, di kelas 11-12 menggunakan spektrum kurikulum lama.

- 4) Lulusan harus melakukan dua ujian, di Kemendikbud mengikuti dua, yakni UKK dan BNSP. Kalau dari BNSP sertifikatnya hanya berbicara kompeten atau tidak kompeten, sedangkan kalau Kemendikbud harus sesuai dengan nilai Ujian Nasional.
- 5) Perolehan kualifikasi harus didapatkan dalam waktu yang lama. Di Jurusan Pelayaran Niaga: Kurikulum Kemenhub berdasarkan IMO, lulusannya bisa bekerja bila mendapat *approval* dari Dirjen Hubla melalui praktik tambahan *try out* selama 2 minggu, setelah itu terdaftar dan kemudian *try out* untuk ujian 7 mata pelajaran Keahlian Pelaut. Setelah lulus, siswa menjalani prala (praktik laut) 12 bulan. Setelah itu turun membuat ujian komprehensif makalah dan dipertanggungjawabkan. Setelah itu ada ujian pascaprala sebanyak 14 mata pelajaran. Setelah itu ujian *modeling* dan dinyatakan baru lulus. Posisi rata-rata

kelulusan siswa di jurusan ini adalah 5,5 tahun terhitung sejak kelas 10-12. Setelah itu, harus praktik 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat manajemen perkapalan.

- 6) Kemarin sekolah mendapat verifikasi dari lembaga lain, dari instansi yang mengeluarkan ijazah keahlian. Ada suatu kebijakan dimana kebijakan itu tidak sinkron dengan dinas. Seperti contoh mewajibkan siswa diprasyarkan praktik kerja industri selama 6 bulan. Sedangkan di kurikulum, tidak sampai segitu. Apabila dipaksakan maka akan ada masalah di sekolah.
- 7) Jam belajar yang ditetapkan oleh Kemendikbud dan Kemenhub berbeda sehingga menimbulkan kebingungan bagi sekolah. Jam pembelajaran dari dinas pendidikan per jamnya adalah 45 menit sedangkan dari perhubungan laut adalah 60 menit. Dari dinas pendidikan sudah ada teori dan praktik sudah jelas waktunya. Namun, dari perhubungan laut, praktik dan teori dipisah jamnya.
- 8) Selain dari kurikulum, juga ada permasalahan di tenaga pendidikan, yang normatif dan

adaptif itu biasa sedangkan untuk produktif harus punya TOT. Itu berbeda sebagai penguji TOT 312.

- 9) Setelah lulus SMK 3 tahun harus mengikuti UKT, *try out* 2 minggu, UKP 7 mata pelajaran sistem gugur. Uji keahlian pelaut menggunakan sistem gugur, apabila tidak lulus salah satunya maka harus mengulang kembali.
- 10) DPKP yang berwenang untuk mengeluarkan ijazah keahlian menyatakan bahwa untuk mendapatkan ijazah, siswa diwajibkan untuk ikut praktik industri selama 6 bulan sedangkan di kurikulum, tidak diatur demikian. Pernah dicoba namun malah menimbulkan masalah, mengenai jumlah waktu praktik yang harus dilakukan. Hal ini perlu diatur agar tidak tumpang tindih peraturannya.
- 11) Ada perbedaan waktu belajar berdasarkan standar Kemendikbud dan Kemenhub. Kurikulum rata-rata kami sampaikan sesuai dengan dinas yang datang. Di dinas pendidikan misalnya, per jam 45 menit, sementara di Kementerian Perhubungan 60 menit.
- 12) Pemenuhan sarana dan prasarana (gedung, alat

praktik pembelajaran) melalui pemerintah pusat, provinsi, masyarakat dengan porsi yang lebih dibanding dengan SMK yang lain (spesifik).

d. Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian, DUDI, Orang Tua dan Lainnya dalam Penyelenggaraan SMK Kemaritiman

- 1) Masyarakat mendukung keberadaan SMK Kemaritiman. Rata-rata siswa yang mendaftar di SMK Kelautan, orang tuanya adalah pelaut. Orang tua memberi dukungan materi dan spiritual kepada anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran di SMKN 1 Grati.
- 2) DAK provinsi dan bantuan untuk revitalisasi SMK. Jadi yang memiliki dana adalah Kemendikbud, sedangkan Kemenhub yang memiliki program. Apabila Kemendikbud mengeluarkan program-programnya, itu termasuk bantuan dananya. Sebaliknya, Kemenhub hanya mengeluarkan programnya tanpa bantuan dananya. Jadi, selama ini sekolah mendapat bantuan dari PSMK, dari DAK. Padahal peralatan kelautan yang di laut

itu mahal, tetapi Kemenhub tidak memberikan dana bantuannya.

- 3) Dukungan dari kementerian salah satunya berupa pelatihan kepada guru dan siswa terkait materi pembelajaran. Ada bantuan pelatihan TOT karena guru produktif pelayaran sudah pasti punya BST. Kalau belum punya BST, jangan harap jadi guru produktif di pelayaran karena sama-sama mengeluarkan uang, lebih baik memberikan pelatihan TOT.
  - 4) Secara umum pemerintah pusat, daerah, DUDI sudah memberikan dukungan salah satunya berupa mitra kerja sama, misalnya tempat PKL siswa dan uji kompetensi keahlian. DUDI bersedia menjadi tempat pembelajaran praktik karena ada beberapa alat yang belum tersedia di SMKN 1 Grati.
- e. Sekolah Menyiapkan Kompetensi Kemaritiman untuk Peserta Didik
- 1) Peningkatan kompetensi guru secara periodik untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Persyaratan dosen minimal ijazah ATT 3 dan harus mempunyai ijazah tersebut kalau mau

mengajar TOT, kalau mau menguji harus mengikuti TOI. SDM yang ada di sekolah masih kurang memenuhi standar kompetensi yang dilakukan.

f. Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Peluang Kerjanya

- 1) Siswa kompeten dalam pembenihan ikan, pembesaran, pemanenan dan pascapanen serta pemasaran, sedangkan peluang kerjanya ke industri bidang perikanan (budidaya dan pengolahan) serta wirausaha.

g. Sekolah Menyalurkan Lulusan ke Dunia Kerja dan Penyerapan Dunia Kerja terhadap Lulusan dari Sekolah

- 1) Belum ada kerja sama untuk penyaluran lulusan sekolah dengan DUDI.
- 2) Di SMKN 1 Grati penyaluran lulusan melalui BKK (Bursa Kerja Khusus).
- 3) Ada komunitas alumni yang sudah bekerja maupun wirausaha yang memberikan informasi ke adik kelasnya.

## 2. Pembahasan

### a. Kurikulum

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum, sekolah tak hanya melihat karakteristik daerah melainkan juga tuntutan dunia kerja, sekolah juga melibatkan *stakeholder* seperti dinyatakan oleh perwakilan SMKN 1 Grati sebagai berikut: “*Untuk mengembangkan kurikulum kami melakukan kerja sama dengan industri, perguruan tinggi, dan instansi terkait. Kami juga melakukan sinkronisasi antara mata pelajaran yang di sekolah dengan kebutuhan di industri dan melakukan studi banding ke sekolah–sekolah yang mempunyai kompetensi keahlian yang sama. Kami juga berusaha memperhatikan keragaman potensi dan karakteristik daerah, karakteristik lingkungan, melihat seperti apa tuntutan dunia kerja, pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa wirausaha*”. Hal senada juga diungkapkan oleh A dari SMKN 2 Tuban yaitu: “*Kurikulum kami sesuaikan dengan pendekatan Kurikulum DPKP,*

*dengan pendekatan dan permintaan DUDI*". Terlihat bahwa sekolah memandang karakteristik dan potensi daerah, peserta didik serta tuntutan DUDI merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dalam mengembangkan kurikulum.

Meski demikian ada hal lain yang menimbulkan keresahan di kalangan SMK Kemaritiman, yaitu terdapatnya dualisme standar pendidikan dari Kemendikbud dan Kemenhub untuk SMK Pelayaran (Kapal Niaga).

Seperti diungkap oleh SMK Kristen Tuban sebagai berikut: "*Yang kami rasakan untuk kurikulum yang ada terjadi kurang sinkron. Kurikulum yang terjadi dari dinas pendidikan kurang sinkron dengan apa yang sudah diatur oleh Dephubla sehingga sekolah membuat 2 kurikulum yaitu dari Kemendikbud dan Kemenhub. Kami berharap, termasuk di dalam MGMP agar ada kesamaan di sekolah*". Ketidaksinkronan tersebut mencakup kurikulum, waktu belajar, waktu perolehan sertifikasi, dan lain-lain.

Seperti diungkapkan oleh H dari SMK AL 2 Surabaya sebagai berikut: "*Jam pembelajaran dari*

*dinas pendidikan per jamnya adalah 45 menit sedangkan dari perhubungan laut itu ada 60 menit. Dari dinas pendidikan sudah ada teori dan praktik sudah jelas jamnya, sedangkan dari perhubungan laut itu praktik dan teori dipisah jamnya”.*

SMK Bhati Samudera menyatakan sebagai berikut: *“Untuk kurikulum ada 2 dari dinas pendidikan dan perhubungan laut. Dari perhubungan laut itu dari IMO. Ada 2 terakreditasi dari diknas A, B, C sedangkan dari hubungan laut itu ada approval. Bila sekarang yang terbaru itu harus ada try out dulu. Setelah ujian praprata. Langsung membuat makalah. Setelah dinyatakan karya tulisnya selesai maka ada ujian pascaprata sebanyak 8-9 mata pelajaran. Setelah pascaprata ada modeling. Setelah lulus ada beberapa sertifikat lagi. Untuk mengambil itu semua diperlukan waktu kurang lebih 6-8 tahun”.* Untuk kapal pengangkap ikan kurikulum perlu disinkronisasikan sesuai dengan kurikulum yang dipersyaratkan dari DPKP (Dewan Penguji Keahlian Pelaut).

Seperti dinyatakan oleh perwakilan SMKN 2 Turen sebagai berikut: *“Kurikulum yang ada seyogyanya*

*dikaji dan direvisi ulang, disesuaikan dengan tujuan akhir dari program lulusan, yaitu memiliki sertifikat keahlian pelaut baik ANKAPIN II maupun ATKAPIN II, sehingga kurikulum perlu disinkronisasikan sesuai dengan kurikulum yang dipersyaratkan dari DPKP (Dewan Penguji Keahlian Pelaut). Selain itu masih banyaknya materi yang sama dari KD satu ke KD yang lainnya, misal dari KD awal sudah dibahas tetapi pada KD berikutnya terdapat pokok bahasan yang sama dengan KD sebelumnya”.*

Masalah kurikulum bukan hanya terkait oleh dualisme kurikulum namun juga kurikulum yang dikembangkan oleh Kemendikbud, umumnya di satu sekolah ada varian kurikulum Kemendikbud, yaitu Kurikulum 2013 (lama) dan Kurikulum 2013 revisi. Hal tersebut dikemukakan oleh perwakilan SMKN 1 Grati sebagai berikut: *“Di SMK Grati itu ada Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Kurikulum yang ada pada agribisnis air tawar itu ada satu kurikulum menggunakan Kemendikbud, tetapi antara kurikulum kelas 10 dengan 11 itu spektrumnya tidak sama. Bila kelas 10*

*menggunakan Kurikulum 2013, sedangkan kelas 11 masih menggunakan kurikulum yang lama*". Selain itu, struktur dan spektrum yang cepat berganti seperti dikemukakan bahwa: *"Struktur dan spektrum kurikulum dalam 3 tahun terakhir ini sudah berganti 3 kali (Budidaya Perikanan Air Tawar, Budidaya Perikanan, Agribisnis Perikanan Air Tawar) sehingga pelaksanaan di SMK sedikit mengalami kendala antara lain mata pelajaran yang dikeluarkan berbeda untuk Budidaya Perikanan Air Tawar dan Budidaya Perikanan lebih banyak mengacu ke proses budidaya sedangkan Agribisnis Perikanan Air Tawar terdapat budidaya ditambah pengolahan dan pemasaran jadi untuk Agribisnis Perikanan Air Tawar lebih kompleks"*.

Kurikulum akan bermakna apabila ditunjang oleh SDM yang mumpuni. Kenyataan di lapangan untuk SDM SMK Kemaritiman terutama untuk produktif masih minim. Seperti diungkapkan oleh perwakilan SMK 2 Turen sebagai berikut: *"Persyaratan tenaga pendidik yang ditetapkan Kemendikbud*

*belum sesuai dengan standar DPKP yang mengacu pada IMO”.*

Secara nyata H dari SMK AL 2 Surabaya memperjelas sebagai berikut: *“Selain dari kurikulum juga ada permasalahan di tenaga pendidikan, yang normatif, adaptif itu biasa sedangkan untuk produktif harus punya sertifikat Training of Trainer (TOT), itu berbeda sebagai penguji TOT 312”.* Bila mengacu pada persyaratan dari Hubla, pendidik/guru untuk mata pelajaran kejuruan (pelaut) harus memiliki sertifikat TOT yang terdiri atas: TOT 6.09 (pembelajaran), TOT 3.12 (pengujian) dan TOT 6.10 untuk instruktur simulator (Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/18.DPJL-16 tanggal 16 Mei 2016). Oleh karenanya guru-guru juga merekomendasikan untuk diadakan TOT untuk para guru produktif, karena selain harus ANT III atau ATT III, guru pengajar juga harus mempunyai TOT 6.09.

Kurikulum juga perlu ditunjang oleh sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Satu hal yang dipersyaratkan

oleh ketentuan Dirjen Hubla yang mengacu pada IMO untuk sekolah memiliki simulator. Oleh karenanya sekolah merekomendasikan agar pemerintah memberikan bantuan simulator untuk Sekolah Pelayaran Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan karena simulator ini sangat mutlak untuk sekolah yang sudah *approval*. Rekomendasi lainnya adalah agar hasil penangkapan kapal *illegal fishing* dihibahkan kepada SMK sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan.

b. Kebijakan dan Dukungan

Secara umum terlihat adanya kebijakan berupa dukungan untuk SMK Kemaritiman tak hanya dari *stakeholder* terkait tetapi juga dari orang tua. Seperti dikemukakan bahwa: “*Dukungan yang diberikan beragam, secara umum pemerintah pusat, daerah, DUDI sudah memberikan dukungan salah satunya berupa mitra kerja sama misalnya tempat PKL siswa dan uji kompetensi keahlian, dukungan dari kementerian salah satunya berupa pelatihan kepada guru dan siswa terkait materi pembelajaran, bahkan DUDI bersedia menjadi tempat pembelajaran praktik karena ada beberapa*

*alat yang belum tersedia di SMKN 1 Grati*". Hal senada dikemukakan oleh SMK Hang Tuah Surabaya sebagai berikut: *"Dukungan pemerintah pusat dengan adanya bantuan berupa Ruang Praktik Siswa, peralatan praktik. Dukungan DUDI dengan menjalin kerja sama untuk tempat praktik berlayar"*. Tidak jauh berbeda diungkapkan oleh A dari SMKN 2 Tuban sebagai berikut: *"Adanya pemberian bantuan langsung untuk sekolah yang berbasis kemaritiman dari pemerintah daerah dan diadakannya Diklat-Diklat fungsional untuk tenaga pendidik"*. Dukungan orang tua dalam penyelenggaraan SMK Kemaritiman hanya sebatas pendanaan SPP serta dukungan materi dan spiritual kepada anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran.

c. Kompetensi Lulusan SMK dan Dunia Kerja

SMK Kemaritiman terutama untuk Program Keahlian Pelayaran Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan umumnya tidak bisa langsung bekerja karena harus mengikuti sertifikasi dari Kemenhub (Hubla) dan BNSP. Lulusan SMK setelah mengikuti UN masih harus mengikuti ujian

negara. Seperti diungkapkan oleh SMK AL 2 Surabaya sebagai berikut: *“Setelah lulus SMK, 3 tahun harus mengikuti UKP, try out 2 minggu, UKP 7 mata pelajaran sistem gugur. Uji keahlian pelaut menggunakan sistem gugur, apabila tidak lulus salah satunya maka harus mengulang kembali”*.

Hal senada diungkapkan oleh SMK Bhakti sebagai berikut: *“Bila sekarang yang terbaru itu harus ada try out dulu. Setelah ujian praprata langsung membuat makalah. Setelah dinyatakan karya tulisnya selesai maka ada ujian pascaprata sebanyak 8-9 mata pelajaran. Setelah pascaprata ada modeling. Setelah lulus ada beberapa sertifikat lagi. Untuk mengambil itu semua diperlukan waktu kurang lebih 6-8 tahun”*. Oleh karena itu, lulusan SMK memerlukan waktu tambahan untuk dapat dikatakan siap pakai.

Dalam Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) yang diselenggarakan oleh BNSP, dilibatkan pula DUDI (Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2016/2017). Terdapat tugas dan fungsi (tusi) yang beririsan antara Kemenhub

dengan BNSP untuk pemberian sertifikasi lulusan SMK.

Untuk sertifikasi dari Hubla mengacu standar dari IMO *Model Course 7.04*. Untuk Program Keahlian Pelayaran Kapal Penangkap Ikan diperlukan sertifikasi yang dikeluarkan oleh DPKP (Dewan Penguji Keahlian Pelaut), sertifikat ini merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan pelaut kapal penangkap ikan setelah lulus ujian kompetensi. Untuk lulusan SMK umumnya disiapkan untuk memperoleh sertifikat ANKAPIN.

Seperti yang dikemukakan oleh SMKN 2 Turen sebagai berikut: *“Untuk kompetensi lulusan kami bekal kompetensi keahlian berupa ANKAPIN 2 dan Kompetensi Pendukung (BST) dan Buku Pelaut”*. Sedangkan dari SMKN 1 Grati menjelaskan sebagai berikut: *“Untuk ujian praktik kelas XII ada 2 jenis yang harus diikuti yaitu Kemendikbud dengan penguji dari industri atau instansi terkait (UKK) mengacu di juknisnya Ujian Nasional dan muncul nilai pada sertifikat, ujian produktif dari BNSP melalui LSP dengan penguji*

*dari asesori dari sekolah yang sudah mempunyai sertifikat. Untuk materinya lebih mengacu ke SKKNI yang diterbitkan oleh Disnaker. Ujian LSP ini dapat dilakukan per tingkat dan mendapatkan sertifikat berlogo garuda dengan keterangan kompeten, sedangkan yang tidak kompeten tidak mendapat sertifikat hanya mendapatkan surat keterangan mengikuti ujian LSP”.*

Dapat disimpulkan bahwa untuk lulusan SMK harus mengikuti beberapa kali ujian, berbeda dengan lulusan SMA yang hanya ikut UN. Meski demikian, lulusan SMK umumnya terserap oleh dunia kerja. Seperti diungkapkan dari SMKN 2 Turen sebagai berikut: *“Untuk lulusan kami ada kerja sama dengan DUDI misalnya sebelum lulus siswa direkrut oleh PT. CIS Jakarta, SBN-Semarang, SIE-Jakarta dan PUMI-Jakarta”.* Perwakilan dari SMK Hang Tuah 2 Surabaya menyatakan sebagai berikut: *“Dengan bantuan Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah, lulusan yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi dicarikan penempatan untuk bekerja di kapal”.*

Adanya dualisme standar pendidikan dari Kemendikbud dan Kemenhub menimbulkan kebingungan bagi sekolah. Kebingungan tersebut mencakup kurikulum, waktu belajar, waktu perolehan sertifikasi, dan lain-lain. Bantuan pemerintah dan pelibatan DUDI juga belum maksimal. Sekolah membutuhkan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualifikasi lulusan. Sekolah juga membutuhkan bantuan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM agar sesuai yang disyaratkan oleh Kemenhub. Selanjutnya, diperlukan kebijakan yang terintegrasi agar pihak sekolah dapat mempersiapkan lulusan dengan kualifikasi yang diharapkan dengan bantuan pendampingan, fasilitas, dan kebijakan yang terintegrasi. SMK telah berupaya menghubungkan kebutuhan lingkungan dan dunia kerja dalam kurikulum tetapi kebijakan kurikulum yang begitu cepat membingungkan sekolah.

## **D. Sumatera Utara**

### **1. Temuan**

#### **a. Cara Mengembangkan Kurikulum**

- 1) Umumnya sekolah memiliki dua kurikulum (untuk normatif dan adaptif mengacu pada Kemendikbud sedangkan untuk produktif mengacu pada Kemenhub yang sesuai standar IMO).
- 2) Kelas XI, XII masih menggunakan kurikulum lama (Kurikulum 2006), Kurikulum 2013 untuk kelas X. Untuk kelas X tidak masalah karena masih dasar, masalah umumnya saat kelas XII produktif C3.
- 3) Kompetensi dasar masih mengarah ke banyak material tak masalah, yang masalah C2 dan C3 karena di perhubungan laut menganut 4 semester, di SMK 6 semester.
- 4) Sekolah umumnya tidak memiliki kapal karena kapal harganya mahal (1,5 M), sempat memiliki kapal namun rusak karena dari kayu dan biaya perawatannya mahal. Untuk sekolah swasta bisa mengusahakan dari SPP namun

untuk negeri agak sulit karena pendanaan dari BOS pun tidak menutupi.

- 5) Standar tenaga pengajar guru produktif harus memiliki sertifikat TOT 609, Diklat tersebut mahal sehingga banyak guru yang belum memiliki sertifikat TOT tersebut.
- b. Aspek yang Diperhatikan dalam Pengembangan Dokumen Kurikulum dan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kurikulum
- 1) Kurikulum dikembangkan dengan cara studi banding sekolah-sekolah kedinasan yang sudah mengembangkan kurikulum di bidang kelautan perikanan sehingga lulusan memiliki standar yang sama dan survei ke industri-industri yang bergerak di bidang kelautan tentang keahlian apa yang di perlukan dalam dunia kerja.
  - 2) Kurikulum juga ditetapkan dengan melihat kondisi lingkungan sekolah.
  - 3) Sekolah melakukan kerja sama dengan industri, perguruan tinggi, dan instansi terkait.
  - 4) Mengembangkan bidang kelautan dan perikanan bisa mengacu ke kurikulum SUPM

(Sekolah Usaha Perikanan Menengah) di bawah Kementerian Kelautan.

- 5) Melakukan studi banding ke sekolah–sekolah yang mempunyai kompetensi keahlian yang sama.
- c. Kebijakan (Pusat/Daerah/Pihak Lain) dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di SMK Kemaritiman
- 1) Kebijakan dari Kemenhub untuk memiliki simulator yang sulit untuk dipenuhi sekolah mengingat harga simulator yang mahal mencapai milyaran.
  - 2) Kebijakan Kemenhub, guru yang harus tersertifikasi dan memiliki sertifikat TOT baik TOT 6.09 (pembelajaran), TOT 3.12 (pengujian) dan TOT 6.10 (instruktur simulator).
  - 3) Adanya program keahlian ganda dari GTK, untuk memenuhi kebutuhan guru produktif, di mana guru-guru normatif dan adaptif dilatih agar bisa menjadi guru produktif.
  - 4) SMK-SMK Kemaritiman baik perikanan dan kelautan maupun pelayaran melakukan

promosi sendiri ke SMP-SMP untuk mencari siswa.

- 5) Kebijakan Kemendikbud untuk kurikulum SMK yang sering berganti sehingga dalam 1 sekolah bisa ada 3 varian yaitu Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi.
  - 6) Jam belajar yang ditetapkan oleh Kemendikbud dan Kemenhub berbeda sehingga menimbulkan kebingungan bagi sekolah. Jam pembelajaran dari dinas pendidikan per jamnya adalah 45 menit sedangkan dari perhubungan laut adalah 60 menit. Dari dinas pendidikan sudah ada teori dan praktik sudah jelas waktunya. Namun, dari perhubungan laut, praktik dan teori dipisah jamnya.
- d. Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian, DUDI, Orang Tua dan Lainnya dalam Penyelenggaraan SMK Kemaritiman
- 1) Dukungan dari pemerintah pusat/daerah adalah memberi subsidi atau bantuan biaya pengambilan sertifikat-sertifikat kepelautan mengingat besarnya biaya pengambilan

sertifikat sehingga banyak lulusan yang tidak mengambil sertifikat tersebut dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan terutama kapal latih, *workshop* navigasi, *workshop* perbengkelan, *workshop* budidaya, dan *workshop* pengolahan.

- 2) Adanya program keahlian ganda untuk guru-guru normatif dan adaptif.
  - 3) Penyediaan sarana prasarana dari pemerintah pusat.
  - 4) Pemberian subsidi atau bantuan biaya pengambilan sertifikat-sertifikat kepelautan.
  - 5) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi kesempatan kepada lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan di BPPP Medan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan.
- e. Sekolah Menyiapkan Kompetensi Kemaritiman untuk Peserta Didik
- 1) Pemenuhan sarana prasarana untuk belajar, misalnya kapal yang dimiliki sudah rusak

sekarang sekolah mengajukan proposal ke Kemenko Kemaritiman untuk pengadaan kapal.

- 2) Pemenuhan tenaga guru melalui pelatihan keahlian ganda untuk guru normatif. Namun umumnya guru yang dilatih kurang menguasai.
  - 3) Menitipkan siswa untuk belajar di BP3 saat akan berlayar.
  - 4) Sekolah pernah menyewakan kapal pada pihak luar karena dengan maksud untuk menutup biaya operasional.
- f. Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Peluang Kerjanya dan dengan Kompetensi yang Dimiliki oleh Lulusan SMK
- 1) Umumnya lulusan melanjutkan studi menjadi pelaut dan mengikuti sertifikasi yang biayanya mahal.
  - 2) Umumnya peserta didik mengikuti sertifikasi dasar BST dan mengambil buku pelaut.
  - 3) SKL yang digunakan mengacu pada standar Hubla (IMO).
- g. Sekolah Menyalurkan Lulusan ke Dunia Kerja dan Penyerapan Dunia Kerja terhadap Lulusan

- 1) Umumnya lulusan SMK bekerja menjadi pelaut.
- 2) DUDI lebih menerima tenaga kerja yang memiliki sertifikat kepelautan sehingga lulusan SMK yang tidak memiliki sertifikat tidak terserap atau berdasarkan rekomendasi dari pihak lain yang sebelumnya telah merekrut dari sekolah yang sama.
- 3) Lulusan ada yang disalurkan oleh sekolah dan ada yang mencari pekerjaan secara mandiri dan sebagian melanjutkan kuliah.

## **2. Pembahasan**

### **a. Kurikulum**

Sekolah mengembangkan kurikulum dengan melihat karakteristik dan potensi daerah seperti dikemukakan dari SMKN 12 sebagai berikut: *“Kita kembangkan sesuai analisis SWOT ya ... lihat kekuatan, kelemahan, kekurangan dan kelebihan sekolah termasuk daerah kita apa, kemudian padukan dengan tuntutan dunia kerja itu apa, karena kita ini SMK beda dengan SMA. Kami biasanya diskusi dengan DUDP”*. Jawaban senada juga dikemukakan oleh SMK Hang Tuah: *“Kurang*

*lebih sama, kami tidak ingin buka sekolah karena trend tapi tak sesuai dengan potensi daerah, kalau kami biasanya diskusi juga dengan yayasan”.*

Dari BP 3 Medan menyatakan sebagai berikut: *“Kurikulum dikembangkan dengan cara studi banding sekolah–sekolah kedinasan yang sudah mengembangkan kurikulum di bidang kelautan perikanan sehingga lulusan memiliki standar yang sama dan survei ke industri–industri yang bergerak di bidang kelautan tentang keahlian apa yang diperlukan dalam dunia kerja”.*

Persoalan pelik lainnya yang dialami oleh sekolah terkait dengan kurikulum adalah adanya dualisme kurikulum yang diterapkan di sekolah juga diakui oleh perwakilan dari 2 SMK. Seperti dikemukakan oleh P dari SMKN 12 Medan sebagai berikut: *“Kami punya kurikulum gabungan, antara Diknas dan Hubla”.* Lebih lanjut pernyataan itu diperjelas oleh A dari SMKN 12: *“Ya kami ada 2 kurikulum. Yang lalu kami 1 kurikulum. Namun karena sudah masuk K13, kami masih KTSP. Untuk Kelas XI, XII masih menggunakan yang lama, untuk Kurikulum 2013 kelas X”.*

SMK Hang Tuah menyatakan bahwa sekolah memiliki kurikulum sinkronisasi. Kurikulum yang ada dipadukan Hubla dan Kemendikbud dan hal tersebut tak jadi masalah, untuk KI-KD dari Hubla dan Kemendikbud hampir sama namun tetap harus dipisahkan. Untuk normatif dan adaptif sekolah mengacu pada Kemendikbud, namun untuk produktif mengacu pada Hubla. Menurut P dari SMKN 12: “*Normatif dan adaptif (wajib a, wajib b tak masalah) yang masalah C2, C3, C1 kan umum*”.

Dualisme kurikulum membawa perbedaan dalam jam belajar dan penyesuaian untuk sarana prasarana karena kurikulum Hubla mengacu pada IMO (*International Maritime Organization*). Perbedaan jam belajar yaitu untuk Kemendikbud 1 JP = 45 menit sedangkan untuk Hubla 1 JP = 60 menit. Hal ini dituturkan pula oleh S dari SMK Hang Tuah sebagai berikut: “*Standar dari Hubla hanya 4 semester, sistem 1 semester 16 kali pertemuan (60 menit). Di SMK 6 semester*”.

Selain itu, penggunaan standar Hubla yang mengacu pada IMO juga menuntut adanya

penyesuaian pada 8 standar yang dimiliki (sama dengan 8 standar yang dimiliki oleh Kemendikbud). Salah satunya adalah sarana prasarana yang mewajibkan sekolah memiliki *engine room simulator*. Umumnya sekolah pelayaran belum memilikinya, bahkan sekolah juga tak memiliki kapal sebagai simbol sekolah pelayaran dan sarana pembelajaran seperti diungkapkan oleh P dari SMKN 12 Medan sebagai berikut: “*Anak ketinggalan karena tak ada unit kapal. Standar SMK itu 20 GT, kami sudah alami punya kapal bantuan revitalisasi, kami beli kapan karena dianjurkan Pak Dirjen untuk punya kapal tahun 2006*”.

B dari BP3 Kota Medan menyatakan sebagai berikut: “*SMK 12 mau eksis di penangkapan ikan tapi tak punya kapal kan sia-sia. Hanya bisa cerita saja ke peserta didik. Mereka tak pernah rasakan. Seharusnya jika anak perlu praktik navigasi langsung ke kapal*”.

SMKN 12 menuturkan sebagai berikut: “*Itu hingga akhir 2010 kapal sudah tak bisa digunakan, pemeliharaan kami tak sanggup jadi kami pajang*

*dekat TPI, lama kelamaan karam, mesin saya angkat. Peralatan semua masih lengkap. Kami berharap bantuan dari Kemendikbud, jika kita memberikan bantuan kapal untuk SMK, jangan menggunakan kapal kayu tapi fiber agar lebih mudah operasional dan perawatan”.* Ketiadaan kapal sebagai sarana pembelajaran membuat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMKN 12 berkurang seperti diungkapkan sebagai berikut: *“Kami di SMK 12 merupakan SMK Kelautan dan Perikanan namun tak punya kapal, saat punya kapal siswa banyak, saat tak ada sepi”.* Hal ini pula yang menyebabkan sekolah melakukan promosi ke SMP-SMP.

Penerapan kurikulum perlu didukung oleh pendidik yang handal. Umumnya di SMK Kemaritiman jarang memiliki guru yang memiliki *background* keahlian kelautan. Seperti diungkapkan oleh orang dari BP 3 Medan sebagai berikut: *“Sumber daya yang masalah kebanyakan guru yang mengajar basic-nya bukan kelautan tapi guru normatif, perencanaan kurikulum tak fokus. Guru-guru matematika dilatih jadi guru perikanan, dan lain-*

*lain. Guru-guru bisa melatih penangkapan dan lain-lain sehingga masalah kompleks. Jika guru tak menguasai bagaimana kurikulumnya, apakah gurunya mengerti kapal untuk apa?'*". Hang Tuah menyatakan sebagai berikut: *"Standar tenaga pengajar guru produktif harus memiliki sertifikat TOT 609"*. Biaya untuk sertifikasi ini cukup besar seperti diungkapkan oleh P dari SMKN 12 sebagai berikut: *"Jika guru SMK negeri ikut TOT sendiri ya biaya mahal sekali"*. Guru mengharapkan adanya kerja sama dengan dinas pendidikan selain untuk menjangkau guru SMK yang lebih besar.

Keberhasilan pembelajaran bukan hanya terletak pada kurikulum meski kurikulum dapat dikatakan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum, sarana prasarana, pendidik merupakan beberapa komponen penunjang terlaksananya pembelajaran dengan baik. Sekolah telah mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah namun terdapatnya dualisme kurikulum menimbulkan kebingungan pada pendidik dan berujung pada penyesuaian-penyesuaian dari dua

standar yang bermuara pada dua kementerian yang berbeda.

### **3. Kebijakan dan Dukungan**

Kebijakan yang mendukung terlaksananya pembelajaran di SMK Kemaritiman bervariasi. Salah satunya dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Kota Medan, lembaga ini membantu dengan menyediakan sarana pembelajaran bagi siswa untuk praktik mengingat sekolah umumnya tak punya kapal seperti dinyatakan D dari SMK Hang Tuah sebagai berikut: *“Kami minta tolong ke BP3, misal kita titip anak kita saat mereka akan ke laut karena jika sesuaikan jadwal kita, berat”*. Hal ini senada dengan pernyataan dari SMKN 12 sebagai berikut: *“Saat BP3 akan praktik, siswa kami numpang”*.

Selain itu BP3 Kota Medan juga menyelenggarakan pelatihan keahlian ganda untuk kompetensi guru normatif. Dukungan lainnya dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Medan tetap memberi kesempatan kepada lulusan SMK mengikuti pelatihan di BPPP Medan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan.

Dukungan dari pemerintah pusat/daerah adalah memberi subsidi atau bantuan biaya pengambilan sertifikat-sertifikat kepelautan mengingat besarnya biaya pengambilan sertifikat sehingga banyak lulusan yang tidak mengambil sertifikat tersebut dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan terutama kapal latih, *workshop* navigasi, *workshop* perbengkelan, *workshop* budidaya, dan *workshop* pengolahan. Kemenko Kemaritiman memberikan kesempatan pada sekolah untuk mengajukan proposal bantuan kapal.

#### **4. Kompetensi Lulusan SMK dan Dunia Kerja**

Standar kompetensi lulusan SMK mengacu pada dua standar, yaitu Kemendikbud dan Kemenhub (Hubla). Lulusan SMK harus mengikuti sertifikasi sebelum dapat pergi berlayar agar dapat diakui secara internasional kemampuannya.

BP3 Kota Medan menyatakan sebagai berikut: “*SMK Maritim lulusannya harus dibekali sertifikat karena saat anak kapal akan diminta sertifikatnya. Kelautan*

*minimal mereka bawa sertifikat basic, kalau perikanan minimal AKP 2, jika memungkinkan tambahkan sertifikat lain. Sertifikat juga untuk ajang promosi sekolahnya”.*

Sertifikasi ini memerlukan biaya yang tak sedikit seperti yang dinyatakan oleh SMKN 12 sebagai berikut: *”SMK Kemaritiman itu sekolah mahal. Karena untuk serifikat dan lain-lain bisa puluhan juta. Ujian akhir kompetensi untuk SMK maritim, pelayaran seharusnya tak perlu karena sudah punya sertifikat standar IMO. Jika dia ambil uji kompetensi materinya sama, lulus mereka berhak dapat sertifikat basic safety training. Mereka belajar materi yang sama bisa berapa bulan, sedangkan di Diklat hanya sekitar 10 hari saja, lulus baru dapat sertifikat”.*

Adanya sertifikasi juga menyebabkan lulusan SMK Kemaritiman memerlukan waktu yang lebih panjang sebelum terserap oleh dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Uniknya lulusan SMK Kemaritiman yang mengambil sertifikasi disamakan dengan lulusan SMP yang mengikuti program yang sama. Karena saat bekerja nanti yang dilihat adalah serifikat, bukan ijazah.

Seperti diungkapkan dari SMKN 12 sebagai berikut: *“Tamatan SMP bisa saingan dengan SMK. Sementara untuk Program Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Perikanan Laut Teknik Kapal Penangkap Ikan, itu biaya cost mahal karena tamat SMK tak ada bekal apa-apa sama saja mereka SMK sekolah swasta. Lebih baik tamat SMP punya bekal seperti sertifikat BST, IMF, TF, SAT karena pada saat kelas 10 anak harus dapat sertifikat apa, kelas 11 dapat sertifikat apa, kelas 12 dapat sertifikat apa, sehingga saat tamat anak SMK siap untuk bekerja”*. Lebih lanjut juga dinyatakan sebagai berikut: *“Masalah tentang sertifikat yang harus diambil dan wajib dimiliki jika memang mau terjun ke dunia pelayaran sama dengan perikanan, harus ada Arkapin 2 dan BST juga”*.

Menurut BP3 Kota Medan: *“SMK harus membekali lulusan/peserta didik dengan sertifikat dasar kepelautan seperti untuk bidang kelautan perikanan berupa sertifikat BST dan ANKAPIN/ATKAPIN, serta membekali lulusan dengan sertifikat kompetensi bidang keahlian seperti sertifikat teknisi kapal penangkap ikan, sertifikat operator kapal penangkap ikan, sertifikat ahli mesin kapal penangkap ikan,*

*sertifikat operator pengolahan hasil perikanan, sertifikat teknisi pembesaran udang, dan lain-lain”.*

Anak yang tak mengikuti sertifikasi umumnya tetap bekerja namun tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya karena umumnya DUDI lebih memprioritaskan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kepelautan, seperti diungkapkan oleh B sebagai berikut: *“DUDI lebih menerima tenaga kerja yang memiliki sertifikat kepelautan sehingga lulusan SMK yang tidak memiliki sertifikat tidak terserap”.* Hal ini senada dengan pernyataan dari SMKN 12, yaitu: *“Sertifikasi tujuannya ke DUDI, untuk naik tingkat agak sulit. Jika tak punya sertifikat, jadi ABK”.*

Lebih lanjut juga dinyatakan sebagai berikut: *“Menyangkut MEA kami di kelautan termasuk BP3, kita sedang galakan sertifikasi sekolah, yang ingin ambil sertifikat bisa ambil biaya sendiri karena belum ada MoU dengan SMK bahwa ada pembiayaan dari SMK, pembiayaan dari pemerintah. Misal, di kelautan penangkapan ikan diterbitkan sertifikat operator (SMK, SMP) dan ahli (D3, SI), di dalam skemanya ada unit kompetensinya masih mengacu pada SKKNI yang diterbitkan di Depnaker. Industri maunya yang*

*seperti itu, sehingga mereka tak perlu training orang. Hasil lulusan SMK bisa dapat sertifikat kompetensi akan lebih baik, SMK lebih baik akan mudah masuk dunia kerja”.*

Banyaknya sertifikasi yang harus dimiliki juga lembaga penyelenggara menyebabkan lulusan SMK terkesan tidak siap pakai, materi yang diajarkan di sekolah tidak diakui dan diperlukan banyak biaya untuk alokasi dana anak bersekolah di SMK Pelayaran.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik daerah ikut menentukan kebijakan untuk pengembangan kemaritiman. Daerah dengan mayoritas penduduk hidup dari dunia maritim berupaya mengelola maritim mulai dari dunia pendidikan. Namun, daerah dengan karakteristik pencaharian utama masyarakat bukan dari maritim, belum berupaya memaksimalkan dunia pendidikan untuk bidang maritim.

Daerah yang fokus mengembangkan kurikulum kemaritiman telah melibatkan *stakeholder* dan DUDI dalam pengembangan pendidikan sehingga pembukaan jurusan juga memperhatikan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Namun, dualisme kurikulum di SMK Kemaritiman yang mengacu pada Kemendikbud dan Kemenhub serta perikanan yang mengacu pada SKKNI dari KKP untuk program keahlian pelayaran membuat sekolah menghadapi dilema standar pendidikan yang harus diikuti.

Standar pendidikan yang berbeda mempengaruhi satuan pendidikan menyiapkan kompetensi kemaritiman untuk peserta didik. Untuk memperoleh ijazah sekolah kejuruan, standar yang digunakan adalah standar dari Kemendikbud. Untuk standar kompetensi profesi, para siswa harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Hal ini menyebabkan legalitas ijazah lulusan SMK tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kekhususannya.

Permasalahan kebijakan (pusat/daerah/pihak lain) dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK Kemaritiman umumnya tidak banyak ditemukan di daerah dengan karakteristik maritim yang kuat. Kesadaran akan potensi maritim yang besar membuat pemerintah daerah berupaya sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dengan membuat program pengembangan SDM dan sarana prasarana. Kesadaran pengembangan potensi maritim juga membuat pihak sekolah melibatkan DUDI dalam penyelenggaraan SMK Kemaritiman, mulai dari pembuatan kurikulum sampai penyaluran kerja. Namun, pelibatan orang tua masih perlu ditingkatkan karena paradigma berpikir yang mengukur kesuksesan secara berbeda. Padahal kompetensi lulusan SMK dan peluang

kerjanya cukup baik. Namun, kendala paradigma berpikir orang tua dan standarisasi kompetensi membatasi peluang kerja siswa. Meskipun ada penyerapan dari dunia kerja terhadap lulusan, peluang kerja tidak dapat dimaksimalkan. Kebijakan sertifikasi antarkementerian terkait yang belum sinergis membuat lulusan SMK maritim yang berkualifikasi baik terkendala untuk bekerja. Kendala utama para lulusan hanyalah pada banyaknya sertifikat kompetensi kemaritiman dan kendala bahasa. Di luar itu, lulusan SMK maritim mempunyai etos kerja yang baik dan kompetensi yang baik.

Oleh karena itu, dibutuhkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, standar pengelolaan, standar pembiayaan yang bermuara pada kemudahan peningkatan kualitas belajar siswa SMK maritim dan penyerapan lulusan SMK di dunia kerja. Dibutuhkan pengembangan pada aspek-aspek ketersediaan SDM, sinkronisasi kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana, bantuan dana, dan pelibatan DUDI secara lebih maksimal.

Di samping itu, juga dibutuhkan pemetaan kebutuhan maritim yang disesuaikan dengan karakteristik daerah karena maritim tidak hanya kelautan dan perikanan.

Bidang-bidang seperti kepelabuhan, pariwisata laut, dan lain-lain masih dapat dijadikan alternatif pengembangan maritim bagi daerah yang memiliki wilayah laut tetapi masyarakatnya tidak hidup dari menangkap ikan/melaut.

## **B. Rekomendasi**

1. Meningkatkan kerja sama antara Direktorat PSMK dengan Direktorat Hubla dalam pengembangan dan sinkronisasi kurikulum, terutama untuk muatan kemaritiman.
2. Meningkatkan mutu pembelajaran melalui: a) pemenuhan sarana prasarana; b) *capacity building* untuk guru produktif; c) pemberdayaan praktisi (pelaut profesional) sebagai tenaga pendidik dengan pemberian tunjangan khusus.
3. Meningkatkan/memfungsikan kembali program keahlian kepelabuhan dan membuka program keahlian lingkungan laut dan keselamatan.
4. Koordinasi dan kerja sama dalam pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara kementerian terkait (KKP, Kemenhub, dan Kemendikbud) antara lain: menentukan standar pendidikan, sertifikasi, dan uji kompetensi.

5. Sinergitas untuk pemberian lisensi/akreditasi antara KKP, Dirjen Hubla (Kemenhub) dengan BAP (Badan Akreditasi Provinsi) S/M (Sekolah/Madrasah).
6. Badan Diklat di Kementerian Perhubungan/KKP di daerah (BLK) harus terbuka menerima siswa melakukan pembelajaran praktik.
7. Pembukaan Program Studi Kemaritiman di perguruan tinggi.
8. Koordinasi pusat, daerah, dan DUDI dalam hal pendirian SMK/pembukaan kompetensi baru sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi yang ada di daerah.
9. Koordinasi pusat, daerah, dan instansi dalam hal sertifikasi kompetensi lulusan.
10. Pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak bersedia menerima siswa praktik dan pemberian *reward* kepada perusahaan yang menerima siswa untuk praktik.
11. Pemberian *reward* kepada siswa yang berkompeten melalui beasiswa/bentuk lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. 2006. *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan*. Islamica Vol. 1 September 2006.
- Al Hanif. Rofi. 2017. *Mendorong Literasi Maritim Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia*. Disampaikan pada *Workshop* Finalisasi Model Pembelajaran Kontekstual di PAUD, 11-12 September 2017 di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud.
- Antoninis. 2016. <http://news.okezone.com/read/2016/09/06/65/1482478/ketidaksetaraan-jadi-masalah-pendidikan-di-indonesia>. Diunduh pada 8 Oktober 2016.
- Arifin, Zainal. 2013. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Jawa Timur 2015*. Jawa Timur: Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- Data Pokok Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Dewantara, Ki Hajar. 2004. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta.
- Djalal, Hasyim. 2014. *Membangun Negara Maritim, Mengelola Potensi Laut Indonesia*. Makalah Diskusi

Panel, Dimuat dalam Visi Maritim Indonesia. (Jakarta: Yayasan Suluh Nusantara Bakti).

Duff, Patricia A. *Case Study Research in Applied Linguistics 2008*. New York dan London: Routledge & Francis Group.

Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

[http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8687/Menggali-Potensi-Rumput-Laut-Sulawesi-Selatan](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8687/Menggali-Potensi-Rumput-Laut-Sulawesi-Selatan). Diunduh pada 23 November 2017.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3508298/banyak-lulusan-smk-jadi-pengangguran-ini-penyebabnya>. Diunduh pada 5 September 2017.

<http://industri.kontan.co.id/news/bappenas-jadikan-vokasi-program-prioritas-2018>. Diunduh pada 4 Juli 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/20840-ID-teknik-focus-group-discussion-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>. Diunduh pada 4 Juli 2018.

<https://tirto.id/kalah-pamor-lulusan-smk-salah-siapa-Bs7>). Diunduh pada 5 September 2017.

<http://wartaekonomi.co.id/read/2014/09/29/35731/tetap-miskin-di-antara-potensi-maritim-berlimpah.html>. Diunduh pada 12 Maret 2016.

<https://www.antaranews.com/berita/464097/di-eas-jokowi-berikan-lima-pilar-poros-maritim-dunia>). Diunduh pada 8 Oktober 2016.

- <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/15/odj7c7-kurikulum-dan-nawacita>. Diunduh pada 8 Oktober 2016.
- <https://www.sulselprov.go.id>. Diunduh pada 18 Desember 2017.
- <https://www.sumutprov.go.id>. Diunduh pada 18 Desember 2017.
- <http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/potensi-pe-ngembangan-wilayah>. Diunduh pada 18 Desember 2017.
- <Humas.unimed.ac.id/fis-gelar-kuliah-umum:sejarah-maritim-di-Sumatera-Utara-terlupakan>. Diunduh pada 23 Desember 2017.
- Kadir. 2010. [http://kadirraea.blogspot.co.id/2010\\_04\\_01\\_archive.html](http://kadirraea.blogspot.co.id/2010_04_01_archive.html). Diunduh pada 12 Maret 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/Kep/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/Kep/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah.
- Komariah, Kokom. 2010. *Memimpikan SMK di Masa Depan*. Disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional Prospek Pendidikan Vokasional dalam Era Globalisasi. Bandung: PKK FPTK UPI.

- Lehoux P., Blake P. & Daudelin G. 2006. *Focus Group Research and "The Patient's View"*. *Social Science and Medicine*, 63, 2091-2104.
- Marsetio. 2014. *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam Mendukung Pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Tangguh*. <http://ejournal.undip.ac.id/>.
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research a Guide to Design and Implementation, Revised and Expanded from Qualitative Research and Case Study Application in Education*. 2009. San Fransisco: Jossey-Base.
- Mudhofir, Ali. 2011. *Aplikasi Pengembangan KTSP dan Materi Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- NN. 2014. *Visi Maritim Indonesia*. Jakarta: Yayasan Suluh Nusantara Bakti.
- Notonegoro, Arief Yulianto. 2010. *Model Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi Dunia Usaha*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/18.DPJL-16 tanggal 16 Mei 2016 Lampiran IX.
- Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA.
- Pujiastuti. 2015. <http://www.mpr.go.id/uploads/magazines/no-1th-ixjanuari-2015.pdf>. Diunduh pada 14 Oktober 2016.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2017. *Naskah Kurikulum Kemaritiman*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud.
- Rasto. 2012. *Pendidikan Kejuruan*. Universitas Pendidikan Indonesia: Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (2015–2035), Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Inspektorat Jenderal.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Republik Indonesia. 2016. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi

Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Tjalla. 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/15/odj7c7-kurikulum>. Diunduh pada 8 Oktober 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wiles, Jon et.al. 2007. *Curriculum Development, A Guide to Practice*. USA: Pearson Prentice Hall.

Wirantho, Spto Aji, Farah Arriani dan Euis Yusmirawati. 2016. *Penelitian Pembelajaran Ekonomi Kreatif di Daerah Maritim*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo.





# MENGEMBANGKAN KURIKULUM KEMARITIMAN

Penelitian bertujuan mengetahui kesiapan daerah dalam mengembangkan kurikulum kemaritiman sesuai dengan karakteristik daerah. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan kepada Kemdikbud, khususnya: 1) Balitbang agar dapat mengembangkan kajian yang berkaitan dengan kurikulum kemaritiman, 2) Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dapat menjembatani kompetensi lulusan peserta didik dengan dunia kerja yang dibutuhkan di dunia kemaritiman.

Penelitian dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karakteristik daerah ikut menentukan kebijakan pengembangan kemaritiman. SMK kemaritiman mengacu pada standar pendidikan Kemendikbud dan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Perikanan dan Kelautan yang mengacu pada SKKNI dari KKP untuk program keahlian pelayaran sehingga sekolah menghadapi dilema untuk mengikuti standar pendidikan yang ditetapkan.

Standar pendidikan yang berbeda mempengaruhi satuan pendidikan menyiapkan kompetensi kemaritiman untuk peserta didik. Untuk memperoleh ijazah sekolah kejuruan digunakan standar Kemdikbud. Untuk kompetensi profesi, para siswa harus mengikuti standar yang ditetapkan kementerian terkait yang menyebabkan ijazah lulusan SMK tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kekhususannya. Meskipun ada penyerapan dari dunia kerja terhadap lulusan, peluang kerja tidak dapat dimaksimalkan. Kebijakan sertifikasi antar kementerian terkait belum sinergis sehingga membuat lulusan SMK maritim yang berkualifikasi baik terkendala untuk bekerja.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018

ISBN 978-602-0792-04-0

